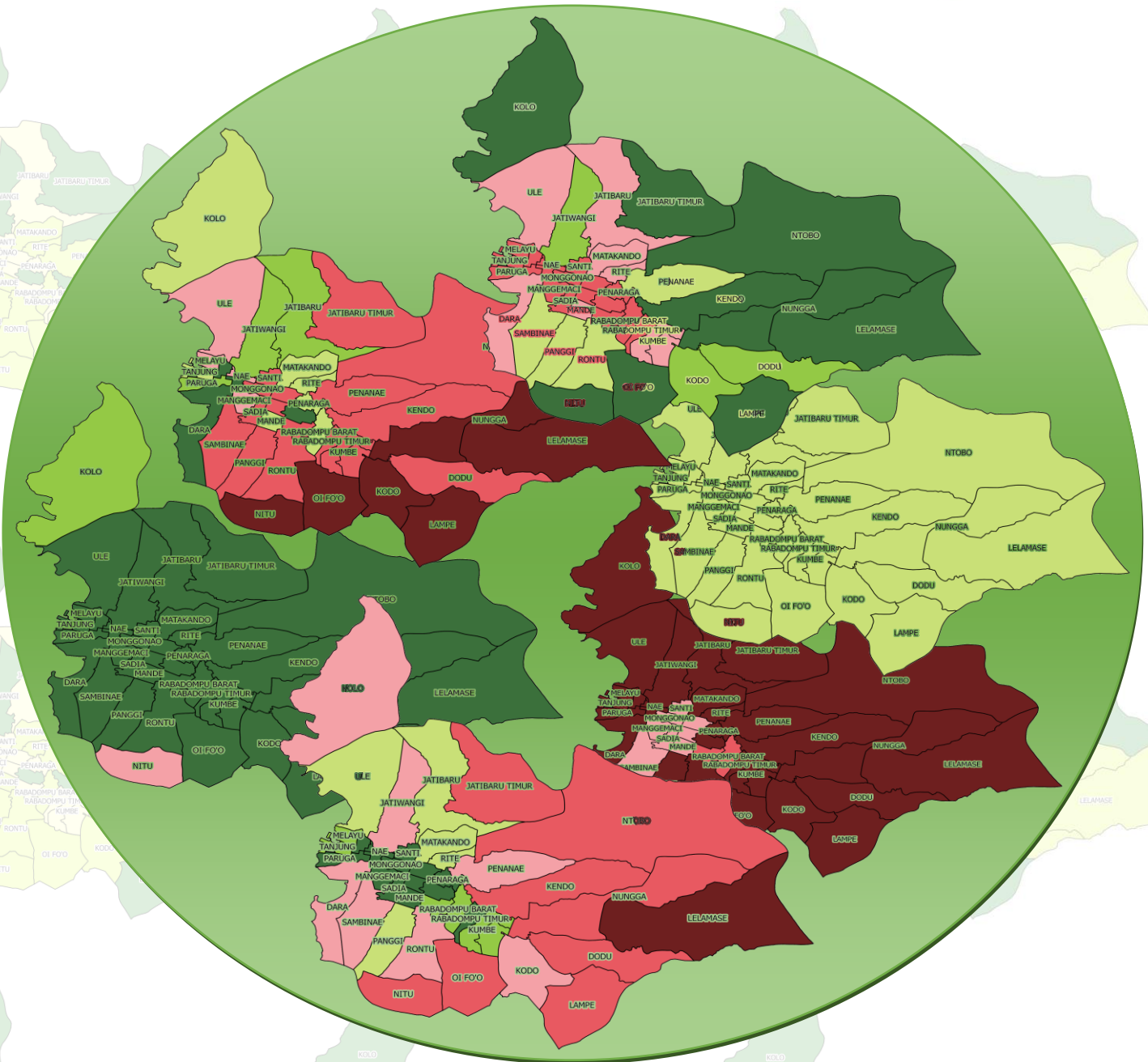


PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN (FOOD SECURITY AND VULNERABILITY ATLAS) KOTA BIMA



BADAN PANGAN NASIONAL



2024



DINAS KETAHANAN PANGAN



WALIKOTA BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA BIMA
NOMOR : 100.3.3.3/ 686 / X /2024

TENTANG

PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN
KOTA BIMA TAHUN 2024

WALIKOTA BIMA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi dan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan, serta untuk menyediakan informasi ketahanan pangan yang akurat dan komprehensif maka perlu disusun Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kota Bima Tahun 2024;
- b. bahwa Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kota Bima sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dapat dimanfaatkan dan digunakan sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang pangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kota Bima Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerinta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
6. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1301);
7. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan Tugas Pembantuan kepada Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota di Lingkungan Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 425);
8. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2022 Nomor 246, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima

Nomor 112);

9. Peraturan Walikota Bima Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2021 Nomor 735);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN KOTA BIMA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kota Bima Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Kota Bima dalam Menyusun rekomendasi kebijakan di bidang pangan.
- KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Bima
pada tanggal 11 Oktober 2024



Tembusan :

- Yth. 1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Kepala Badan Pangan Nasional di Jakarta;
3. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram;
4. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB di Mataram;
5. Kepala Bappeda Kota Bima di Raba;
6. Kepala Dinas Pertanian Kota Bima di Raba;
7. Kepala Dinas Sosial Kota Bima di Raba;
8. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bima di Raba;
9. Kepala Dinas Koperindag Kota Bima di Raba;
10. Kepala Dinas PUPR Kota Bima di Raba.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BIMA
NOMOR : 100.3.3.3/686/X/2024
TENTANG
PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN

PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN
FOOD SECURITY AND VULNERABILITY ATLAS (FSVA)
KOTA BIMA
TAHUN 2024

Pengarah :

Ichwanul Muslimin, SP.,MM
(Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima)

Ketua :

Muh. Ilham, S.Pt
(Kepala Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi)

Anggota :

Abdul Najir, S.Pt, MM
Mutadayyinah, S. Hut
Nurramdani, S.ST Gz
Repta Warman
Sulastri Dewi, SE
Marlina, S.Pt
Ardiansyah, S.Pt
Siti Hawa, SP

Kerjasama :



BADAN PANGAN NASIONAL

Dengan



DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA BIMA



WALIKOTA BIMA

SAMBUTAN

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Segala puji hanya milik Allah, semoga rahmat dan hidayah Allah selalu tercurah untuk kita semua dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sehari-hari sebagai Aparatur Sipil Negara. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah untuk junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Allaihi Wassalam.

Saya menyambut baik atas terbitnya buku "Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food security and Vulnerability Atlas /FSVA)" Kota Bima tahun 2024 karena buku FSVA merupakan dokumen yang berisi informasi tentang kelurahan yang tahan dan rentan terhadap pangan, Saya berharap buku ini menjadi salah satu dokumen acuan dalam perencanaan program dan kegiatan bagi seluruh OPD dalam menentukan arah dan kebijakannya dalam memperbaiki, memperkuat dan meningkatkan pembangunan ketahanan pangan di Kota Bima.

Komitmen pemerintah Kota Bima adalah menempatkan pembangunan ketahanan pangan sebagai salah satu prioritas RPJMD, sehingga kebijakan pembangunan pertanian, infrastruktur dan jasa diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan masyarakat Kota Bima. Saya selaku Pj. Walikota Bima menyampaikan terima kasih kepada Tim Penyusun atas terbitnya buku ini, semoga bermanfaat bagi kita semua dalam meningkatkan ketahanan pangan dan gizi masyarakat Kota Bima.

"Wassalamu'alikum Warahmatullahi Wabarakatuh"



KATA PENGANTAR

Undang-undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 114 dan Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi Pasal 75 mengamanatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban membangun, menyusun, dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi, yang dapat digunakan untuk perencanaan, pemantauan dan evaluasi, stabilisasi pasokan dan harga pangan serta sebagai sistem peringatan dini terhadap masalah pangan dan kerawanan pangan dan gizi.

Berkaitan dengan hal tersebut, Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima mengembangkan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan/Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) yang diperbaharui setiap tahunnya. FSVA menyediakan informasi bagi para pengambil keputusan sebagai salah satu dasar dalam menyusun perencanaan program dan kebijakan ketahanan pangan dan gizi termasuk upaya untuk pengentasan daerah rentan rawan pangan.

Saya berharap dengan penyusunan FSVA di Kota Bima menjadi lebih akurat dan mencerminkan kondisi dan fakta yang ada, karena dengan FSVA yang akurat, pemantauan dini dapat lebih ditingkatkan agar kejadian rawan pangan dapat di deteksi lebih dini.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Kota Bima,



ICHWANUJI MUSLIMIN, SP.,MM
Pembina (IV/a)
NIP. 19720229 200501 1 005

RINGKASAN EKSEKUTIF

1. Ketersediaan informasi ketahanan pangan yang akurat, komprehensif, dan tertata dengan baik sangat penting untuk mendukung upaya pencegahan dan penanganan kerawanan pangan dan gizi, karena dapat memberikan arah dan rekomendasi kepada pembuat keputusan dalam penyusunan program, kebijakan, serta pelaksanaan intervensi di tingkat pusat dan daerah. Penyediaan informasi diamanahkan dalam UU No 18/2012 tentang Pangan dan PP No 17/2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi yang mengamanatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk membangun, menyusun, dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi.
2. Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas – FSVA*) merupakan peta tematik yang menggambarkan visualisasi geografis dari hasil analisa data indikator kerentanan terhadap kerawanan pangan. Informasi dalam FSVA menjelaskan lokasi wilayah rentan dan tahan terhadap kerawanan pangan berdasarkan 6 indikator.
3. FSVA Kota Bima merupakan peta yang menggambarkan situasi ketahanan dan kerentanan pangan wilayah Kelurahan. Indikator yang digunakan dalam penyusunan FSVA merupakan turunan dari tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Pemilihan indikator didasarkan pada: (i) keterwakilan 3 pilar ketahanan pangan (ii) tingkat sensitifitas dalam mengukur situasi ketahanan pangan dan gizi; dan (iii) ketersediaan data tersedia secara rutin untuk periode tertentu yang mencakup seluruh wilayah kelurahan. Enam indikator digunakan dalam penyusunan FSVA Kota Bima.
4. Indikator pada aspek ketersediaan pangan adalah (1) Rasio luas lahan pertanian terhadap total jumlah penduduk; (2) Rasio jumlah sarana dan prasarana ekonomi terhadap jumlah rumah tangga. Indikator pada akses pangan adalah (1) Rasio penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap total jumlah penduduk; (2) kelurahan dengan akses penghubung kurang memadai. Indikator pada aspek pemanfaatan pangan adalah: (1) Rasio rumah tangga tanpa akses air bersih; (2) Rasio tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk.
5. Kelurahan diklasifikasikan dalam 6 kelompok ketahanan pangan dan gizi berdasarkan pada tingkat keparahan dan penyebab dari situasi ketahanan pangan dan gizi. Kelurahan di Prioritas 1, 2 dan 3 merupakan wilayah rentan pangan dengan klasifikasi Prioritas 1 sangat rentan pangan, Prioritas 2 rentan pangan, dan prioritas 3 agak rentan pangan. Kelurahan di Prioritas 4, 5, dan 6 merupakan wilayah tahan pangan dengan klasifikasi prioritas 4 agak tahan pangan, prioritas 5 tahan pangan, sedangkan prioritas 6 yaitu sangat tahan pangan.
6. Hasil analisis FSVA Kota Bima Tahun 2024 secara komposit menunjukkan bahwa tidak terdapat kelurahan rentan pangan (prioritas 1-3). Namun 41 kelurahan di Kota Bima berada pada wilayah tahan pangan (prioritas 4-5) yang terdiri dari 16 kelurahan atau sebesar 39,02% berada pada prioritas 4 (agak tahan pangan), 18 kelurahan atau sebesar 43,90% berada pada prioritas 5 (tahan pangan) dan 7 kelurahan atau sebesar 17,07% berada pada prioritas 6 (sangat tahan pangan).

7. Hasil analisis FSVA Kota Bima Tahun 2024 berdasarkan prioritas individu / 6 indikator terdiri dari :
- Rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk (indikator 1): prioritas 1-3 sebanyak 25 kelurahan (60,98%) rentan pangan, sedangkan prioritas 4-6 sebanyak 16 kelurahan (39,02%) tahan pangan.
 - Rasio jumlah sarana dan prasarana ekonomi terhadap jumlah rumah tangga (indikator 2) : prioritas 1-3 sebanyak 28 kelurahan (68,29%) rentan pangan, sedangkan prioritas 4-6 sebanyak 13 kelurahan (1,71%) tahan pangan.
 - Rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk (indikator 3) : prioritas 1-3 sebanyak 1 kelurahan (2,44%) rentan pangan, sedangkan prioritas 4-6 sebanyak 40 kelurahan (97,56%) tahan pangan.
 - Kelurahan yang tidak memiliki akses penghubung memadai melalui darat atau air atau udara (indikator 4): tidak ada kelurahan yang tidak memiliki akses penghubung yang memadai (0%)
 - Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga (indikator 5): prioritas 1-3 sebanyak 41 kelurahan (100%) rentan pangan.
 - Rasio jumlah tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk (indikator 6): prioritas 1-3 sebanyak 16 kelurahan (39,02%) rentan pangan sedangkan prioritas 4-6 sebanyak 25 kelurahan (60,98%) tahan pangan.
8. Program-program peningkatan ketahanan pangan dan penanganan kerentanan pangan di Kota bima diarahkan pada kegiatan :
- Peningkatan produksi dan produktivitas lahan pertanian.
 - Peningkatan penyediaan sarana pangan yang memadai.
 - Penanganan kemiskinan melalui penyediaan lapangan kerja, pemberian bantuan sosial dan serta pembangunan usaha produktif/UMKM untuk menggerakkan ekonomi masyarakat.
 - Peningkatan akses air bersih melalui penyediaan fasilitas dan layanan air bersih.
 - Peningkatan penyediaan jumlah, pelayanan dan kesejahteraan tenaga kesehatan.

DAFTAR ISI

SAMBUTAN WALIKOTA BIMA	iii
KATA PENGANTAR	iv
RINGKASAN EKSEKUTIF	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GRAFIK	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Kerangka Konsep Ketahanan Pangan dan Gizi	2
1.3. Metodologi	5
2. KETERSEDIAAN PANGAN	9
2.1. Lahan Pertanian	9
2.2. Produksi	11
2.3. Sarana dan Prasarana Ekonomi	14
2.4. Strategi Pemenuhan Ketersediaan Pangan	15
3. AKSES PANGAN	17
3.1. Penduduk Dengan Kesejahteraan Terendah	17
3.2. Akses Transportasi	19
3.4. Strategi Peningkatan Akses Pangan	19
4. PEMANFAATAN PANGAN	21
4.1. Akses Terhadap Air Bersih	21
4.2. Rasio Tenaga Kesehatan	22
4.3. Dampak Dari Status Kesehatan	24
4.4. Strategi Peningkatan Pemanfaatan Pangan	26
5. KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN KOMPOSIT	29
5.1. Kondisi Ketahanan Pangan	29
5.2. Faktor Penyebab Kerentanan Pangan	30
6. REKOMENDASI KEBIJAKAN	31
7. PENUTUP	32

DAFTAR TABEL

1.	Indikator FSVA Kota Bima 2024	6
2.	Bobot Indikator Individu	7
3.	Sebaran Rasio Luas Lahan Pertanian Terhadap Jumlah Penduduk Berdasarkan Prioritas	10
4.	Produksi Serealisa Pokok dan Umbi-umbian 2019-2023 (Ton)	11
5.	Luas Lahan Pertanian Kota Bima Tahun 2022	12
6.	Luas Lahan Sawah yang Beralih Fungsi di Kota Bima	12
7.	Jumlah Kebutuhan dan Konsumsi Beras di Kota Bima	13
8.	Sebaran Rasio Sarana Prasarana Ekonomi Berdasarkan Prioritas.....	14
9.	Sebaran Kelurahan Dengan Tingkat Kesejahteraan Terendah Berdasarkan Skala Prioritas	18
10.	Sebaran Kelurahan Berdasarkan Rumah Tangga Tanpa Akses Air Bersih Berdasarkan Skala Prioritas	21
11.	Sebaran Rasio Tenaga Kesehatan Di kelurahan Berdasarkan Skala Prioritas.....	23
12.	Tabel Jumlah Balita Stunting dan Gizi Buruk	25
13.	Jumlah Kematian Balita dan Ibu Saat Melahirkan per Kecamatan	25
15.	Sebaran Jumlah Kelurahan Berdasarkan Prioritas	30

DAFTAR GRAFIK

1.	Sebaran Rasio Luas Lahan Pertanian Terhadap Jumlah Penduduk Berdasarkan Prioritas	10
2.	Produksi Serealisa Pokok dan Umbi-umbian 2018-2022 (Ton)	11
3.	Jumlah Penduduk Kota Bima Per Kecamatan.....	13
4.	Sebaran Rasio Sarana Prasarana Ekonomi Berdasarkan Prioritas	15
5.	Porsentase Penduduk Miskin Kota Bima sampai dengan Tahun 2023.....	17
6.	Sebaran Kelurahan Dengan Tingkat Kesejahteraan Terendah Berdasarkan Skala Prioritas	18
7.	Sebaran Kelurahan Berdasarkan Rumah Tangga Tanpa Akses Air Bersih Berdasarkan Skala Prioritas	22
8.	Sebaran Rasio Tenaga Kesehatan Di kelurahan Berdasarkan Skala Prioritas	22
9.	Kematian Balita dan Ibu Saat Melahirkan per Kecamatan	25

DAFTAR LAMPIRAN

1.	Data Analisis FSVA Kota Bima Tahun 2024	32
2.	Hasil Analisis FSVA Kota Bima Tahun 2024	33
3.	Jumlah dan Persentase Prioritas Komposit	34
4.	Faktor Berpengaruh Terhadap Rawan Pangan	35

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Kota Bima terdiri dari 5 kecamatan dan 41 kelurahan dengan jumlah penduduk Tahun 2023 berdasarkan proyeksi sebesar 161.362 jiwa (BPS Kota Bima). Secara geografis Kota Bima terletak di antara 118° 41' - 118° 48' Bujur Timur dan antara 8° 20' - 8° 30' Lintang Selatan. Kota Bima di sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima dan Laut Flores, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Palibelo sebelah timur berbatasan dengan Wawo Kabupaten Bima berbatasan dengan memiliki wilayah daratan 22.225 Ha. Secara memiliki pola tipe curah Curah hujan pola tipe curah hujan yang puncak musim hujan) Juni, Juli dan Agustus terjadi musim kering. Sedangkan untuk bulan Desember, Januari dan Februari merupakan bulan basah. Sisa enam bulan lainnya merupakan periode peralihan atau pancaroba (tiga bulan peralihan musim kemarau ke musim hujan dan tiga bulan peralihan musim hujan ke musim kemarau).



berbatasan dengan Kabupaten Bima, dengan Kecamatan dan sebelah barat Teluk Bima yang seluas 222,25 km² atau klimatologis, Kota Bima hujan tipe monsun. monsun dicirikan oleh bersifat unimodial (satu dimana pada bulan

Pada tahun 2023 pertumbuhan ekonomi Kota Bima sebesar 5,16 persen, menunjukkan sudah adanya mengalami perbaikan ekonomi sejak adanya pandemi covid-19 tahun 2020 yang mana pertumbuhan ekonominya negatif. Pertumbuhan dengan nilai positif tertinggi berada di sektor Jasa Perusahaan sebesar 7,91 persen. Sementara itu, pertumbuhan dengan nilai negatif berada di sektor Pengadaan Air, Pengelolaan sampah, Limbah, dan Daur Ulang sebesar -1,97 persen.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Bima atas dasar harga berlaku pada tahun 2023 mencapai 4.986,32 miliar rupiah sedangkan atas dasar harga konstan 2010 sebesar 3.174,09 miliar rupiah. Sektor-sektor yang berperan besar terhadap pembentukan PDRB tersebut adalah

sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 26,04 persen, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 13,68 persen, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib 10,91 persen, Transportasi dan Pergudangan 9,21 persen, Konstruksi 8,24 persen, Jasa Pendidikan 7,87 persen, dan real Estate 5,21 persen.

Undang-undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 114 dan Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi Pasal 75 mengamanatkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban membangun, menyusun, dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi, yang dapat

digunakan untuk perencanaan, pemantauan dan evaluasi, stabilisasi pasokan dan harga pangan serta sebagai sistem peringatan dini terhadap masalah pangan dan kerawanan pangan dan gizi.

Informasi tentang ketahanan dan kerentanan pangan penting untuk memberikan informasi kepada para pembuat keputusan dalam pembuatan program dan kebijakan, baik di tingkat pusat maupun tingkat lokal, untuk lebih memprioritaskan intervensi dan program berdasarkan kebutuhan dan potensi dampak kerawanan pangan yang tinggi. Informasi tersebut dapat dimanfaatkan sebagai salah satu instrumen untuk mengelola krisis pangan dalam rangka upaya perlindungan/penghindaran dari krisis pangan dan gizi baik jangka pendek, menengah maupun panjang.

Dalam rangka menyediakan informasi ketahanan pangan yang akurat dan komprehensif, disusunlah Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan/*Food Security and Vulnerability Atlas-FSVA* sebagai instrumen untuk monitoring ketahanan pangan wilayah. Di tingkat nasional FSVA disusun sejak tahun 2002 bekerja sama dengan *World Food Programme (WFP)*. Kerjasama tersebut telah menghasilkan Peta Kerawanan Pangan (*Food Insecurity Atlas - FIA*) pada tahun 2005. Pada tahun 2009, 2015, 2018 disusun Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas – FSVA*).

Sebagai tindak lanjut penyusunan FSVA Nasional disusun pula FSVA Provinsi dengan analisis sampai tingkat kecamatan dan FSVA Kabupaten dengan analisis sampai tingkat desa/kelurahan. Dengan demikian, permasalahan pangan dapat dideteksi secara cepat sampai level yang paling bawah. FSVA kabupaten telah disusun sejak tahun 2012 dan dimutakhirkan pada tahun 2016. Untuk mengakomodir perkembangan situasi ketahanan pangan dan pemekaran wilayah kelurahan, maka dilakukan pemutakhiran FSVA Kabupaten pada tahun 2019.

Seperti halnya FSVA Nasional dan Provinsi, FSVA Kabupaten menyediakan sarana bagi para pengambil keputusan untuk secara cepat dalam mengidentifikasi daerah yang lebih rentan, dimana investasi dari berbagai sektor seperti pelayanan jasa, pembangunan manusia dan infrastruktur yang berkaitan dengan ketahanan pangan dapat memberikan dampak yang lebih baik terhadap penghidupan, ketahanan pangan dan gizi masyarakat pada tingkat kelurahan.

Pengembangan FSVA tingkat desa/kelurahan merupakan hal yang sangat penting, dimana kondisi ekologi dan kepulauan yang membentang dari timur ke barat, kondisi iklim yang dinamis dan keragaman sumber penghidupan masyarakat menunjukkan adanya perbedaan situasi ketahanan pangan dan gizi di masing-masing wilayah. FSVA Kabupaten/kota akan menjadi alat yang sangat penting dalam perencanaan dan pengambilan keputusan untuk mengurangi kesenjangan ketahanan pangan.

1.2. KERANGKA KONSEP KETAHANAN PANGAN DAN GIZI

Peran pangan bukan hanya penting untuk memenuhi kebutuhan fisik dasar dan mencegah kelaparan, namun lebih jauh dari itu peran pangan dengan kandungan gizi di dalamnya bagi kecerdasan bangsa dan peningkatan kualitas hidup manusia untuk menghasilkan manusia yang sehat, cerdas, aktif dan produktif seperti disebutkan dalam definisi ketahanan pangan. Kecukupan pemenuhan pangan dalam jumlah dan mutunya berkorelasi dengan produktivitas

kerja dan pertumbuhan otak serta kecerdasan dan pada akhirnya berperan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

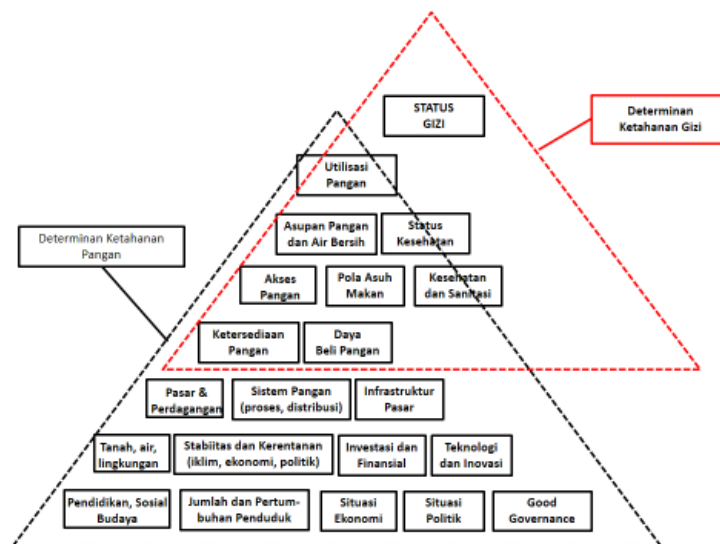
Dalam undang-undang didefinisikan bahwa ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Menimbang pentingnya ketahanan pangan dalam pembangunan nasional, Bab III Undang-undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 mengamanatkan bahwa Pemerintah harus melakukan perencanaan penyelenggaraan pangan. Pada pasal 6, penyelenggaraan pangan diarahkan untuk mewujudkan kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan.

Definisi ketahanan pangan (*food security*) yang dianut oleh *Food and Agricultural Organisation* (FAO) dan dirujuk oleh UU Pangan saat ini mengacu pada konsep awal *food security* yang dihasilkan oleh *World Food Summit* tahun 1996. Merujuk pada konsep tentang pentingnya *nutrition security* yang diajukan oleh Unicef pada awal tahun 1990an yang menambahkan aspek penyakit infeksi sebagai penyebab masalah gizi disamping ketahanan pangan rumah tangga, maka *International Food Policy Research Institute* (IFPRI) menyebut konsep ketahanan pangan FAO tersebut sebagai *Food and Nutrition Security*. Pada Tahun 2012 FAO¹ mengajukan definisi *food security* menjadi *food and nutrition security* untuk menyempurnakan konsep dan definisi sebelumnya.

Upaya FAO ini sejalan dengan upaya *Standing Committee on Nutrition* (SCN), suatu lembaga non struktural yang juga berada di bawah United Nations (PBB) yang pada Tahun 2013² juga merekomendasikan penyempurnaan definisi ketahanan pangan (*food security*) menjadi ketahanan pangan dan gizi (*food and nutrition security*). Dalam pemahaman baru ini, perwujudan ketahanan pangan tidak hanya berorientasi pada upaya penyediaan pangan dalam jumlah yang cukup bagi setiap individu, namun juga harus disertai upaya untuk meningkatkan efektivitas pemanfaatan pangan bagi terciptanya status gizi yang baik bagi setiap individu. Dalam konteks ini optimalisasi utilisasi pangan tidak cukup hanya dari kualitas pangan yang dikonsumsi, namun juga harus didukung oleh terhindarnya setiap individu dari penyakit infeksi yang dapat mengganggu tumbuh kembang dan kesehatan melalui kecukupan air bersih dan kondisi sanitasi lingkungan dan higiene yang baik. Kerangka pikir ketahanan pangan dan gizi ini dituangkan dalam Gambar 1.1.

¹ Disampaikan pada Committee on World Food Security, 36th sessions of 15-22 October 2012, Rome-Italia

² Disampaikan pada UNSCN Meeting of the Minds and Nutrition Impact of Food System, 25-28 March di New York



Gambar 1.1. Konsep Ketahanan Pangan dan Gizi
(Sumber: FAO dan UNSCN)

Analisis dan pemetaan FSVA dilakukan berdasarkan pada pemahaman mengenai **ketahanan pangan dan gizi** seperti yang tercantum dalam Kerangka Konsep Ketahanan Pangan dan Gizi (Gambar 1.1). Kerangka konseptual tersebut dibangun berdasarkan tiga pilar ketahanan pangan, yaitu: ketersediaan, akses dan pemanfaatan pangan, serta mengintegrasikan gizi dan kerentanan di dalam keseluruhan pilar tersebut.

Ketersediaan pangan adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri, cadangan pangan, serta pemasukan pangan (termasuk didalamnya impor dan bantuan pangan) apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. Ketersediaan pangan dapat dihitung pada tingkat nasional, regional, kecamatan dan tingkat masyarakat.

Akses pangan adalah **kemampuan rumah tangga untuk memperoleh** cukup pangan yang bergizi, melalui satu atau kombinasi dari berbagai sumber seperti: produksi dan persediaan sendiri, pembelian, barter, hadiah, pinjaman dan bantuan pangan. Pangan mungkin tersedia di suatu daerah tetapi tidak dapat diakses oleh rumah tangga tertentu jika mereka tidak mampu secara fisik, ekonomi atau sosial, mengakses jumlah dan keragaman makanan yang cukup.

Pemanfaatan pangan merujuk pada **penggunaan pangan oleh rumah tangga** dan **kemampuan individu** untuk menyerap dan memetabolisme zat gizi. Pemanfaatan pangan juga meliputi cara penyimpanan, pengolahan dan penyiapan makanan, keamanan air untuk minum dan memasak, kondisi kebersihan, kebiasaan pemberian makan (terutama bagi individu dengan kebutuhan makanan khusus), distribusi makanan dalam rumah tangga sesuai dengan kebutuhan individu (pertumbuhan, kehamilan dan menyusui), dan status kesehatan setiap anggota rumah tangga. Mengingat peran yang besar dari seorang ibu dalam meningkatkan profil gizi keluarga, terutama untuk bayi dan anak-anak, pendidikan ibu sering digunakan sebagai salah satu *proxy* untuk mengukur pemanfaatan pangan rumah tangga.

Dampak gizi dan kesehatan merujuk pada status gizi individu, termasuk defisiensi mikronutrien, pencapaian morbiditas dan mortalitas. Faktor-faktor yang berhubungan dengan pangan, serta

praktek-praktek perawatan umum, memiliki kontribusi terhadap dampak keadaan gizi pada kesehatan masyarakat dan penanganan penyakit yang lebih luas.

Kerentanan dalam peta ini selanjutnya merujuk pada kerentanan terhadap **kerawanan pangan dan gizi**. Tingkat kerentanan individu, rumah tangga atau kelompok masyarakat ditentukan oleh pemahaman terhadap faktor-faktor risiko dan kemampuan untuk mengatasi situasi tertekan.

Kerawanan pangan dapat menjadi kondisi yang kronis atau transien. **Kerawanan pangan kronis** adalah ketidakmampuan jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan pangan minimum dan biasanya berhubungan dengan struktural dan faktor-faktor yang tidak berubah dengan cepat, seperti iklim setempat, jenis tanah, sistem pemerintahan daerah, infrastruktur publik, sistem kepemilikan lahan, distribusi pendapatan dan mata pencaharian, hubungan antar suku, tingkat pendidikan, sosial budaya/adat istiadat dll.

Kerawanan pangan transien adalah ketidakmampuan sementara yang bersifat jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan pangan minimum yang sebagian besar berhubungan dengan faktor dinamis yang dapat berubah dengan cepat/tiba-tiba seperti penyakit menular, bencana alam, pengungsian, perubahan fungsi pasar, tingkat hutang dan migrasi. Perubahan faktor dinamis tersebut umumnya menyebabkan kenaikan harga pangan yang lebih mempengaruhi penduduk miskin dibandingkan penduduk kaya, mengingat sebagian besar dari pendapatan penduduk miskin digunakan untuk membeli makanan. Kerawanan pangan transien yang berulang dapat menyebabkan kerawanan aset rumah tangga, menurunnya ketahanan pangan dan akhirnya dapat menyebabkan kerawanan pangan kronis.

1.3. Metodologi

Kerentanan pangan dan gizi adalah masalah multi-dimensional yang memerlukan analisis dari sejumlah parameter. Kompleksitas masalah ketahanan pangan dan gizi dapat dikurangi dengan mengelompokkan indikator *proxy* ke dalam tiga kelompok yang berbeda tetapi saling berhubungan, yaitu ketersediaan pangan, keterjangkauan/akses rumah tangga terhadap pangan dan pemanfaatan pangan secara individu. Pertimbangan gizi, termasuk ketersediaan dan keterjangkauan bahan pangan bergizi tersebar dalam ketiga kelompok tersebut.

Indikator

Kerentanan terhadap kerawanan pangan tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten, memiliki karakteristik masing-masing sehingga tidak semua indikator nasional maupun provinsi dapat digunakan untuk memetakan kerentanan terhadap kerawanan pangan di tingkat kabupaten. Pemilihan indikator FSVA Kabupaten/kota didasarkan pada: (i) hasil review terhadap pemetaan daerah rentan rawan pangan yang telah dilakukan sebelumnya; (ii) tingkat sensitivitas dalam mengukur situasi ketahanan pangan dan gizi; (iii) keterwakilan pilar ketahanan pangan dan gizi; dan (iv) ketersediaan data pada seluruh kelurahan.

Indikator yang digunakan dalam FSVA Kota Bima terdiri dari 6 (enam) indikator yang mencerminkan tiga aspek ketahanan pangan.

Tabel 1. Indikator FSVA Kota Bima 2024

Indikator	Definisi	Sumber Data
A. Aspek Ketersediaan Pangan		
Rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk	Luas lahan pertanian dibandingkan jumlah penduduk	Dinas Pertanian Kota Bima 2023.
Rasio jumlah sarana dan prasarana ekonomi terhadap jumlah rumah tangga	Jumlah sarana dan prasarana ekonomi (pasar, minimarket, toko, warung, restoran dll) dibandingkan jumlah rumah tangga	Potensi Kelurahan 2021 diolah BKP, BPS Kota Bima 2023
B. Aspek Akses terhadap Pangan		
Rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk	Jumlah penduduk dengan status kesejahteraan terendah dibandingkan jumlah penduduk	Dinas Sosial Kota Bima 2023
Kelurahan yang tidak memiliki akses penghubung memadai melalui darat atau air atau udara	Kelurahan yang tidak memiliki akses penghubung memadai dengan mempertimbangkan sarana dan prasarana transportasi darat, air, dan udara dengan kriteria: (1) dapat dilalui sepanjang tahun; (2) dapat dilalui sepanjang tahun kecuali saat tertentu (ketika turun hujan, pasang, dll.); (3) dapat dilalui selama musim kemarau; (4) tidak dapat dilalui sepanjang tahun.	Potensi Kelurahan 2021 diolah BKP, BPS Kota Bima 2023.
C. Aspek Pemanfaatan Pangan		
Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga	Jumlah rumah tangga dengan sumber air bersih tidak terlindung dibandingkan dengan jumlah rumah tangga	Dinas Kesehatan Kota Bima 2023
Rasio jumlah tenaga kesehatan terhadap jumlah kepadatan penduduk	Jumlah penduduk kelurahan per tenaga kesehatan yang terdiri dari: 1) tenaga medis; (2) tenaga keperawatan; (3) tenaga kebidanan; dan (4) tenaga gizi, dibandingkan dengan kepadatan penduduk	Dinas Kesehatan Kota Bima 2023

Metode Analisis

a. Analisis Indikator Individu

Analisis indikator individu dilakukan dengan mengelompokkan indikator individu ke dalam beberapa kelas berdasarkan metode sebaran empiris. Sementara itu data kategorik mengikuti standar pengelompokkan yang sudah ditetapkan oleh BPS.

b. Analisis Komposit

Metodologi yang diadopsi untuk analisis komposit adalah dengan menggunakan metode pembobotan. Metode pembobotan digunakan untuk menentukan tingkat kepentingan relatif indikator terhadap masing-masing aspek ketahanan pangan. Metode pembobotan dalam penyusunan FSVA mengacu pada metode yang dikembangkan oleh *The Economist Intelligence Unit* (EIU) dalam penyusunan *Global Food Security Index* (EIU 2016 dan 2017) dan *International Food Policy Research Institute* (IFPRI) dalam penyusunan *Global Hunger Index* (IFPRI 2017). Goodridge (2007) menyatakan jika variabel yang digunakan dalam perhitungan indeks berbeda, maka perlu dilakukan secara tertimbang (pembobotan) untuk membentuk indeks agregat yang disesuaikan dengan tujuannya.

Langkah-langkah perhitungan analisis komposit adalah sebagai berikut:

- Standarisasi nilai indikator dengan menggunakan *z-score* dan *distance to scale* (0 – 100)
- Menghitung skor komposit kabupaten/kota dengan cara menjumlahkan hasil perkalian antara masing-masing nilai indikator yang sudah distandarisasi dengan bobot indikator, dengan rumus:

$$Y(j) = \sum_{n=1}^9 a_i X_{ij} \dots \dots \dots (1)$$

Dimana :

Y_j : Skor komposit kabupaten/kota ke-j

a_i : Bobot masing-masing indikator

X_{ij} : Nilai standarisasi masing-masing indikator pada kabupaten/kota ke-j

Besaran bobot masing-masing indikator dibagi sama besar untuk setiap aspek ketahanan pangan, karena setiap aspek memiliki peran yang sama besar terhadap penentuan ketahanan pangan wilayah. Bobot untuk setiap indikator mencerminkan signifikansi atau pentingnya indikator tersebut dalam menentukan tingkat ketahanan pangan suatu wilayah.

Tabel 2. Bobot Indikator Individu

No	Indikator	Bobot
1.	Rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk	1/6
2.	Rasio jumlah sarana dan prasarana ekonomi terhadap jumlah rumah tangga	1/6
Sub Total		1/3
3.	Rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk kelurahan	1/6

4.	Kelurahan yang tidak memiliki akses penghubung memadai	1/6
Sub Total		1/3
5	Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga kelurahan	1/6
6	Rasio jumlah tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk kelurahan	1/6
Sub Total		1/3

- c. Mengelompokkan kelurahan ke dalam 6 kelompok prioritas berdasarkan *cut off point* komposit. Skor komposit yang dihasilkan pada masing-masing wilayah dikelompokkan ke dalam 6 kelompok berdasarkan *cut off point* komposit. *Cut off point* komposit merupakan hasil penjumlahan dari masing-masing perkalian antara bobot indikator individu dengan *cut off point* indikator individu hasil standarisasi z-score dan *distance to scale* (0-100).

$$K(j) = \sum_{n=1}^9 a_i c_{ij} \dots\dots\dots (2)$$

Dimana:

K_j : *cut off point* komposit ke-J

a_i : Bobot indikator ke-i

C_{ij} : Nilai standarisasi *cut off point* indikator ke-I kelompok ke-j

Wilayah yang masuk ke dalam kelompok 1 adalah kelurahan yang cenderung memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi dari pada kelurahan dengan kelompok diatasnya, sebaliknya wilayah pada kelompok 6 merupakan kelurahan yang memiliki ketahanan pangan paling baik. Penting untuk menegaskan kembali bahwa sebuah kelurahan yang diidentifikasi sebagai relatif lebih tahan pangan (kelompok Prioritas 4-6), tidak berarti semua penduduk di dalamnya juga tahan pangan. Demikian juga, tidak semua penduduk di kelurahan Prioritas 1-3 tergolong rentan pangan.

c. Pemetaan

Hasil analisis komposit kemudian divisualisasikan ke dalam sebuah bentuk peta. Selain itu, indikator individu juga divisualisasikan ke dalam bentuk peta berdasarkan range indikatornya, sehingga akan dihasilkan tujuh peta yang terdiri dari satu peta komposit dan enam peta indikator individu. Peta-peta yang dihasilkan menggunakan gradasi warna merah dan hijau. Gradasi merah menunjukkan variasi tingkat kerentanan terhadap kerawanan pangan dan gradasi hijau menggambarkan variasi ketahanan pangan. Warna yang semakin tua menunjukkan status yang lebih tinggi dari situasi ketahanan atau kerentanan pangan. Pemetaan dilakukan dengan menggunakan software Quantum-GIS.

BAB 2

KETERSEDIAAN PANGAN

Undang-undang Pangan No. 18 Tahun 2012 mendefinisikan ketersediaan pangan sebagai kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. Produksi pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk Pangan. Sedangkan cadangan pangan nasional adalah persediaan pangan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk konsumsi manusia dan untuk menghadapi masalah kekurangan pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat. Penyediaan pangan diwujudkan untuk memenuhi kebutuhan dan konsumsi pangan bagi masyarakat, rumah tangga dan perseorangan secara berkelanjutan.

Mayoritas bahan pangan yang diproduksi maupun didatangkan dari luar wilayah harus masuk terlebih dahulu ke pasar sebelum sampai ke rumah tangga. Oleh karena itu, selain kapasitas produksi pangan, keberadaan sarana dan prasarana penyedia pangan seperti pasar akan terkait erat dengan ketersediaan pangan di suatu wilayah.

2.1. LAHAN PERTANIAN

Rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk adalah perbandingan antara luas lahan pertanian (sawah, ladang, pekarangan, kebun, dan lainnya) penghasil pangan (produktif) dengan jumlah penduduk. Lahan pertanian memiliki nilai manfaat penggunaan (*use value*) yang di dapat dari hasil kegiatan usaha tani yang dilakukan pada lahan tersebut.

Rasio lahan pertanian terhadap jumlah penduduk digunakan sebagai salah satu indikator dalam aspek ketersediaan pangan karena lahan pertanian memiliki korelasi yang positif terhadap tingkat ketersediaan pangan dengan mempengaruhi kapasitas produksi pangan, luas lahan pertanian dapat mengacu pada luasan tanam di wilayah tersebut. Oleh sebab itu, semakin tinggi rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk maka diasumsikan ketersediaan pangan untuk memenuhi kebutuhan penduduk di wilayah tersebut juga akan semakin baik, begitu pula sebaliknya.

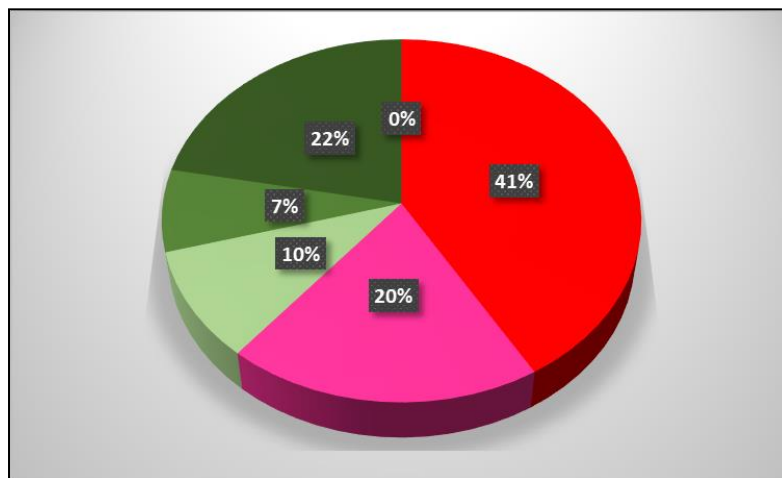
Dari sebanyak 41 kelurahan di Kota Bima, tidak ada kelurahan masuk dalam prioritas 1 (0%), sebanyak 17 kelurahan prioritas 2 (41,46%) dan 8 kelurahan prioritas 3 (19,51%).

Kecamatan yang memiliki rasio lahan pertanian prioritas 1-3 paling banyak tersebar di Kecamatan Mpunda sebanyak 8 kelurahan, yaitu Mande, Sadia, Manggemaci, Monggonae, Lewirato, Penatoi, Santi dan Matakando. Di Kecamatan Rasanae Barat sebanyak 6 kelurahan, yaitu Paruga, Tanjung, Sarae, Nae, Dara dan Pane. Di Kecamatan Raba sebanyak 6 kelurahan yaitu Rabangodu Selatan, Rabangodu Utara, Penaraga, Rabadompou Timur, Rabadompou Barat dan Rite. Di Kecamatan Asakota sebanyak 3 kelurahan yaitu Melayu, Jatibaru dan Ule. Di Kecamatan Rasanae Timur sebanyak 2 kelurahan yaitu Kumbe dan Oimbo.

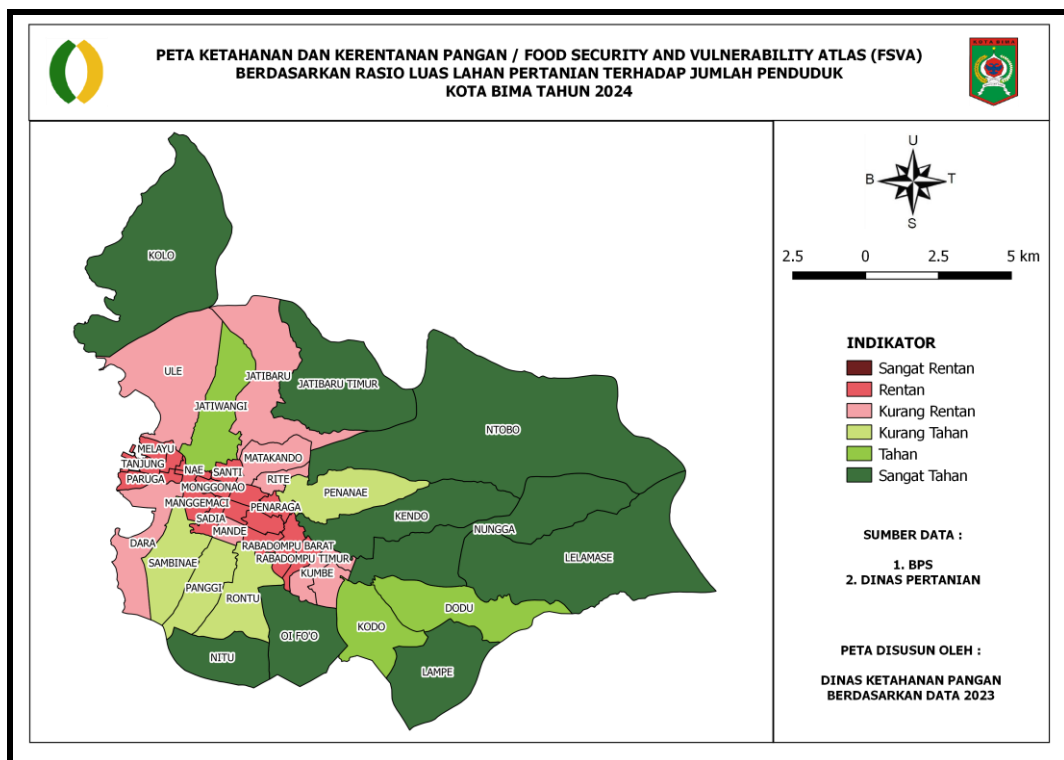
Tabel 3. Sebaran Rasio Luas Lahan Pertanian Terhadap Jumlah Penduduk Berdasarkan Prioritas.

Prioritas	Rasio Lahan Pertanian	Jumlah Kelurahan	Persentase
1	<0.0004	0	00,00
2	0.0004	17	41,46
3	0.0100	8	19,51
4	0.0803	4	9,76
5	0.1458	3	7,32
6	>0.2643	9	21,95

Grafik 1. Sebaran rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk berdasarkan prioritas.



Peta Indikator Luas Lahan Pertanian



2.2. PRODUKSI

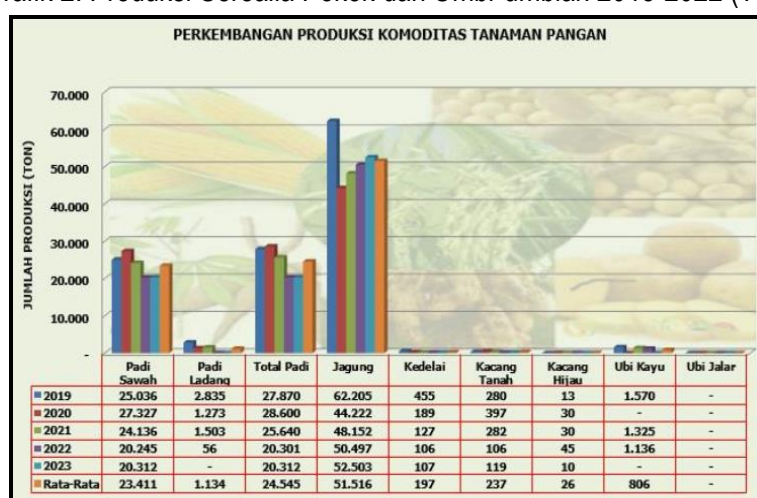
Pemerintah Kota Bima melalui Dinas Pertanian Kota Bima dalam meningkatkan produksi telah melakukan upaya pendampingan dan pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian dan upaya pengendalian organisme pengganggu tumbuhan tanaman pangan dan hortikultura. Pertanian (termasuk peternakan, kehutanan, dan perikanan) telah memberikan kontribusi sebesar 13,68% dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Bima pada Tahun 2023 dan memberikan peluang yang signifikan untuk berkontribusi dalam meningkatkan ketahanan pangan, penanggulangan kemiskinan, dan dinamika pertumbuhan ekonomi. Padi dan jagung merupakan bahan pokok di Kota Bima yang menyumbang hampir 98,05% dari total produksi pangan Kota Bima.

Tabel 4. Produksi Serealial Pokok dan Umbi-umbian 2019-2023 (Ton)

PERKEMBANGAN PRODUKSI (Ton) KOMODITAS TANAMAN PANGAN							
No.		2019	2020	2021	2022	2023	Rata-Rata
1	Padi Sawah	25.036	27.327	24.136	20.245	20.312	23.411
2	Padi Ladang	2.835	1.273	1.503	56	-	1.134
3	Total Padi	27.870	28.600	25.640	20.301	20.312	24.545
4	Jagung	62.205	44.222	48.152	50.497	52.503	51.516
5	Kedelai	455	189	127	106	107	197
6	Kacang Tanah	280	397	282	106	119	237
7	Kacang Hijau	13	30	30	45	10	26
8	Ubi Kayu	1.570	-	1.325	1.136	-	806
9	Ubi Jalar	-	-	-	-	-	-

Sumber Data : Dinas Pertanian Kota Bima Tahu 2023

Grafik 2. Produksi Serealial Pokok dan Umbi-umbian 2018-2022 (Ton)



Berdasarkan data diatas bahwa perkembangan produksi padi mengalami penurunan meskipun jika dibandingkan dengan produksi tahun lalu sedikit mengalami kenaikan, demikian pula halnya

dengan jagung, kedelai, kacang tanah dan kacang hijau. Sementara ubi kayu dan ubi jalar terus mengalami penurunan dan bahkan sampai tidak berproduksi.

Berkurangnya produksi serelia dan umbi-umbian di Kota Bima dapat disebabkan oleh berkurangnya luas lahan pertanian yang diakibatkan oleh alih fungsi lahan pertanian menjadi pemukiman warga, kemudian bisa juga disebabkan oleh alih komoditi dari biasa menanam padi ladang/ubi kayu/ubi jalar menjadi menanam jagung. Penurunan produksi pangan juga dapat disebabkan oleh curah hujan dari tahun ke tahun mengalami penurunan mengakibatkan persediaan air untuk irigasi pertanian semakin sedikit. Dampak el-nino yang berkepanjangan bisa menjadi salah satu faktor kurangnya curah hujan disebagian besar wilayah Kota Bima yang berdampak pada menurunnya produksi tanaman pangan.

Tabel 5. Luas Lahan Sawah yang Beralih Fungsi di Kota Bima.

No.	Kecamatan	Luas Lahan Sawah Eksisting (Ha)		Luas Lahan Yg Beralih Fungsi (Ha)	Lokasi Yang Berpotensi Akan Terjadi Alih Fungsi	IP Lahan Yang Beralih Fungsi	Provitas Dari Lahan Yang Beralih Fungsi (Kw)	Prod. Yang Hilang Dari Lahan Yg Beralih Fungsi (Ton)	Aturan Alih Fungsi Lahan
		2023	2024						
1	Asakota	196,10	187,74	(8,36)	Asakota	200,00	57,89	34,73	
2	Rasanae Barat	3,37	3,37	-	Rasanae Barat	-	-	-	
3	Mpunda	206,43	175,23	(31,20)	Mpunda	200,00	56,98	45,58	
4	Raba	490,37	520,52	30,15	Raba	200,00	57,17	85,76	
5	Rasanae Timur	605,78	605,83	0,05	Rasanae Timur	-	-	-	
Total Kota Bima		1.502,05	1.492,69	(9,36)				166,073	

Sumber Data : Dinas Pertanian Kota Bima Tahun 2024.

Dari data alih fungsi lahan sawah diatas menunjukkan luas lahan sawah Kota Bima mengalami penurunan sebesar 9,36 Ha Dimana luas lahan sawah Tahun 2023 sebesar 1.502,05 Ha menjadi 1.492,69 Ha di Tahun 2024. Sementara jika dilihat dari produksi yang hilang dari lahan yang beralih fungsi bisa mencapai 166,073 ton.

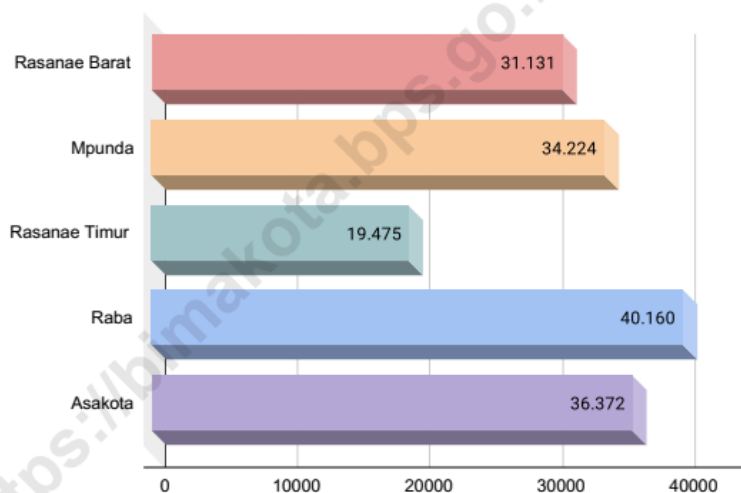
Tabel 6. Luas Lahan Pertanian di Kota Bima Tahun 2023

NO	URAIAN	KOTA BIMA					TOTAL
		ASAKOTA	R. BARAT	MPUNDA	RABA	R. TIMUR	
1	LAHAN PERTANIAN						
1.1	Lahan Sawah						
a	Irigasi	158,00	3,37	175,23	378,01	459,28	1.173,89
b	Tadah Hujan	29,74	-	-	142,51	146,55	318,80
c	Rawa pasang surut	-	-	-	-	-	-
d	Rawa lebak	-	-	-	-	-	-
	Jumlah lahan sawah	187,74	3,37	175,23	520,52	605,83	1.492,69
	Realisasi Dalam 1 (Satu) Tahun : 1 X	29,74	2,02	-	142,51	146,57	320,84
	2 X	128,83	1,35	115,52	151,47	250,09	647,25
	3 X	29,17	-	59,71	226,54	209,17	524,60
		187,74	3,37	175,23	520,52	605,83	1.492,69
a	Tegal/Kebun	1.888,60	138,63	400,40	1.835,33	1.883,93	6.146,89
b	Ladang/Huma	290,00	-	138,00	518,00	353,00	1.299,00
c	Perkebunan	10,00	-	-	-	-	10,00
d	Ditanami pohon/hutan rakyat	-	35,00	148,12	804,45	1.409,43	2.397,00
e	Padang penggembalaan/padang rumput	6,00	-	-	-	-	6,00
f	Hutan Negara	4.182,00	226,00	154,00	1.908,00	1.795,00	8.265,00
g	Sementara tidak diusahakan*)	-	-	-	-	-	-
h	Lainnya (tambak kolam, empang dll)	8,00	96,00	-	-	3,00	107,00
1.2	Jumlah lahan pertanian bukan sawah	6.384,60	495,63	840,52	5.065,78	5.444,36	18.230,89
2	Lahan Bukan Pertanian (jalan, pemukiman, perkantoran, sungai dll**)	330,66	515,00	512,25	786,70	356,81	2.501,42
Total (Luas Wilayah Kelurahan) = Jumlah Lahan Sawah + Jumlah Lahan Pertanian Bukan Sawah + Jumlah Lahan Bukan Pertanian		6.903,00	1.014,00	1.528,00	6.373,00	6.407,00	22.225,00

Sumber Data : Dinas Pertanian Kota Bima Tahun 2024

Dari tabel diatas menunjukkan luas lahan pertanian di Kota Bima pada Tahun 2023 sebesar 19.723,58 Ha, jika dibandingkan dengan luas lahan pertanian pada Tahun 2022 sebesar 19.759,39 Ha, maka luas lahan pertanian di Kota Bima mengalami pengurangan sebesar 35,81 Ha. Lahan pertanian terluas berada di Kecamatan Rasanae Timur sedangkan luas lahan pertanian yang terkecil berada di Kecamatan Rasanae Barat.

Grafik 3. Jumlah Penduduk Kota Bima Per Kecamatan



Proyeksi jumlah penduduk Kota Bima Tahun 2023 berdasarkan Sensus Penduduk Tahun 2022 sebanyak 161.362 Jiwa, terdiri dari 80.085 jiwa penduduk laki-laki dan 81.277 jiwa penduduk Perempuan, dimana jumlah terbesar berada di Kecamatan Raba dan yang terkecil berada di Kecamatan Rasanae Timur.

Tabel 7. Jumlah Kebutuhan dan Konsumsi Beras Penduduk Kota Bima Tahun 2023

Tahun 2023		
Luas Panen Padi	3.545	Ha
Produksi	20.312	Ton GKG
Beras	12.843	Ton
Jumlah Penduduk	157.362	Jiwa
Konsumsi Beras	102,6	Kg Per Kapita
Total Kebutuhan Beras	16.145.341	Kg
	16.145	Ton
(Lebih / Kurang)	(3.302)	Ton

Sumber Data : Dinas Pertanian Kota Bima Tahun 2024

Jika dilihat dari tabel diatas, maka jumlah kebutuhan beras penduduk Kota Bima masih kurang sebesar 3.302 ton, dimana jumlah produksi beras domestik sebanyak 12.843 ton sedangkan kebutuhan beras penduduk Kota Bima sebanyak 16.145 ton.

Hal ini menyebabkan kebutuhan beras Kota Bima harus di datangkan dari luar daerah seperti Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu dan kabupaten Sumbawa melalui perdagangan antar wilayah dan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah.

2.3. SARANA DAN PRASARANA EKONOMI

Rasio jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga adalah perbandingan antara jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan (pasar, minimarket, toko, warung, restoran, dll) dengan jumlah rumah tangga di kelurahan. Sarana dan prasarana penyedia pangan diasumsikan sebagai tempat penyimpanan pangan (stok pangan) yang diperoleh dari petani sebagai produsen pangan maupun dari luar wilayah, yang selanjutnya disediakan bagi masyarakat untuk konsumsi. Oleh karena itu, semakin tinggi rasio sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga di kelurahan maka diasumsikan semakin baik tingkat ketersediaan pangan di kelurahan tersebut. Rendahnya kualitas infrastruktur; terbatasnya akses terhadap aset produktif, terbatasnya akses terhadap kegiatan ekonomi produktif merupakan penyebab kemiskinan dan kerawanan pangan.

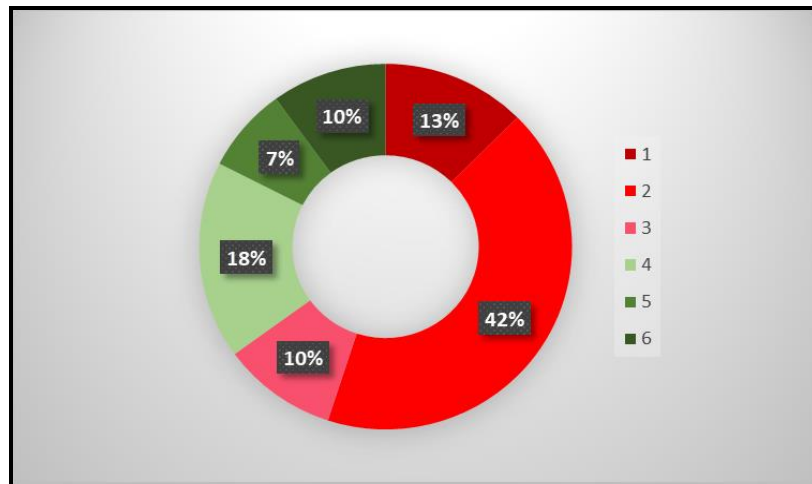
Indikator sarana dan prasarana penyedia pangan digunakan sebagai indikator yang melengkapi indikator sebelumnya karena bisa jadi suatu wilayah kelurahan tidak memiliki potensi untuk memproduksi pangan sendiri, namun kelurahan tersebut memiliki sarana dan prasarana penyedia pangan sehingga ketersediaan pangan di kelurahan tersebut masih dapat mencukupi kebutuhan konsumsi masyarakat.

Dari 41 kelurahan di Kota Bima, 5 kelurahan masuk dalam prioritas 1 (12,20%), 17 kelurahan prioritas 2 (41,46%) dan 4 kelurahan prioritas 3 (9,76%). Sebagian besar berada di Kecamatan Rasanae Timur sebanyak 8 kelurahan yaitu : Lampe, Dodu, Nungga, Kumbe, Oi Fo'o, Kodo, Lelamase dan Oimbo. Kemudian di Kecamatan Mpunda sebanyak 8 kelurahan yaitu Sambinae, Panggi, Sadia, Manggemaci, Monggonao, Lewirato, Penatoi dan Santi. di Kecamatan Raba sebanyak 7 kelurahan yaitu Nitu, Rontu, Rabangodu Timur, Rabangodu Selatan, Kendo, Penanae dan Ntobo. Di Kecamatan Asakota sebanyak 3 kelurahan yaitu Melayu, Ule dan Jatibaru Timur, dan di Kecamatan Rasanae Barat yaitu di Kelurahan Nae.

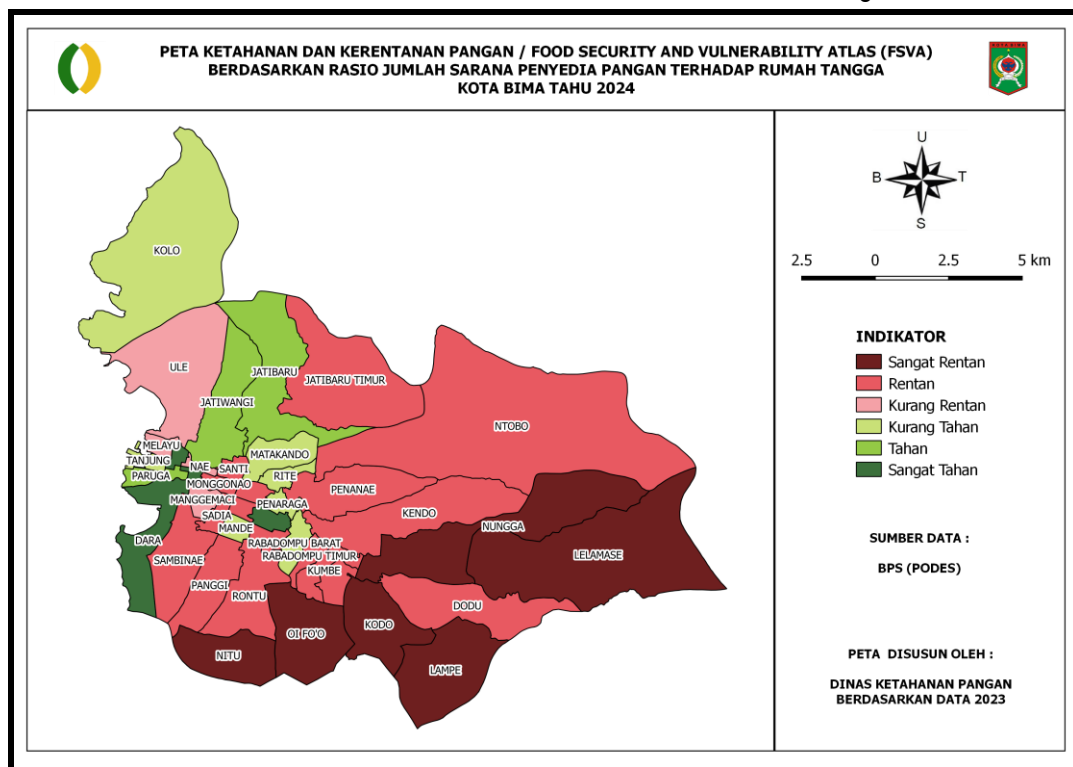
Tabel 8. Sebaran Rasio Sarana Prasarana Ekonomi Berdasarkan Prioritas

No.	Prioritas	Rasio Sarana Ekonomi	Jumlah Kelurahan	Persentase
1	1	<0,0351	5	12,20
2	2	0,0551	17	41,46
3	3	0,0666	4	9,76
4	4	0,0838	7	17,07
5	5	0,0982	3	07,31
6	6	>0,0982	4	09,76

Grafik 4. Sebaran Rasio Sarana Prasarana Ekonomi Berdasarkan Prioritas



Peta FSVA Berdasarkan Indikator Rasio Sarana Pangan



2.4. STRATEGI PEMENUHAN KETERSEDIAAN PANGAN

Laju pertumbuhan penduduk Kota Bima Tahun 2003 mencapai 0,76%, sementara pertumbuhan produksi padi 0,009% dan jagung 0,011%. Rata-rata kepemilikan lahan petani di Kota Bima adalah sebesar 0,5 Ha. Rasio lahan pertanian terhadap jumlah penduduk kota bima adalah sebesar 30,44%. Sedangkan rasio sarana ekonomi penyedia pangan terhadap jumlah rumah tagga sebesar 21,38%, hal ini menjadi tantangan bagi Pemerintah Daerah dalam menjamin ketersediaan pangan di Kota Bima.

Kebijakan Kota Bima mengenai ketersediaan pangan bertujuan untuk (i) meningkatkan produktivitas pertanian; (ii) optimalisasi lahan pertanian (iii) mengurangi dampak iklim-terkait resiko; (iv) memperkuat kelembagaan bagi petani; (v) penyediaan sarana pangan dan (vi) Perjanjian Kerjasama antar wilayah pada daerah penyuplai.

Strategi untuk masing-masing tujuan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan produktivitas
 - a. Pendirian Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman dan Sumber Daya Terpadu (SLPTT)
 - b. Perbaikan penggunaan varietas tanaman
 - c. Pemupukan berimbang, baik pupuk organik maupun bio hayati
 - d. Pengelolaan air
 - e. Memperkuat pengawasan, koordinasi dan supervisi untuk peningkatan produktivitas pertanian
2. Optimalisasi lahan pertanian.
 - a. Optimasi lahan
 - b. Pengembangan dan rehabilitasi Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) dan Jaringan Irigasi Kelurahan.
 - c. Pembangunan sumur pompa (irigasi tanah dangkal dan Irigasi tanah dalam) dan check dam serta embung
3. Pengurangan dampak iklim terkait resiko
 - a. Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)
 - b. Mengurangi kehilangan hasil (susut) pada saat panen dan pengolahan hasil panen
4. Penguatan kelembagaan bagi petani
 - a. Kredit dan energi untuk ketahanan pangan
 - b. Lembaga Mandiri dan Mengakar pada Masyarakat
 - c. Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat
 - d. Pemasaran produk pertanian, misalnya melalui Toko Tani Indonesia (TTI), Mitra Tani Indonesia dan Perusahaan Umum Daerah (Perumda).
5. Penyediaan sarana pangan melalui pemberian bantuan sarana/tempat usaha dan modal usaha.
6. Kerjasama antar Pemerintah Daerah dalam hal pemasukan bahan pangan dari daerah surplus ke daerah defisit .

BAB 3

AKSES TERHADAP PANGAN

Keterjangkauan pangan atau akses terhadap pangan adalah kemampuan rumah tangga untuk memperoleh cukup pangan, baik yang berasal dari produksi sendiri, stok, pembelian, barter, hadiah, pinjaman dan bantuan pangan. Pangan mungkin tersedia di suatu wilayah tetapi tidak dapat diakses oleh rumah tangga tertentu karena terbatasnya: (1) **Akses ekonomi**: kemampuan keuangan untuk membeli pangan yang cukup dan bergizi; (2) **Akses fisik**: keberadaan infrastruktur untuk mencapai sumber pangan; dan/atau (3) **Akses sosial**: modal sosial yang dapat digunakan untuk mendapatkan dukungan informal dalam mengakses pangan, seperti barter, pinjaman atau program jaring pengaman sosial. Dalam penyusunan FSVA Kota Bima, indikator yang digunakan dalam aspek keterjangkauan pangan hanya mewakili akses ekonomi dan fisik saja, yaitu: (1) Rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk kelurahan; dan (2) kelurahan yang tidak memiliki akses penghubung memadai melalui darat, air atau udara.

3.1 PENDUDUK DENGAN TINGKAT KESEJAHTERAAN TERENDAH

Penduduk miskin di Kota Bima mengalami penurunan sebesar 8,67% atau sebanyak 13.990 jiwa jika dibandingkan dengan tahun lalu sebesar 8,80% atau sebanyak 16.440 jiwa

Grafik 5. Porsentase Penduduk Miskin Kota Bima sampai dengan Tahun 2023



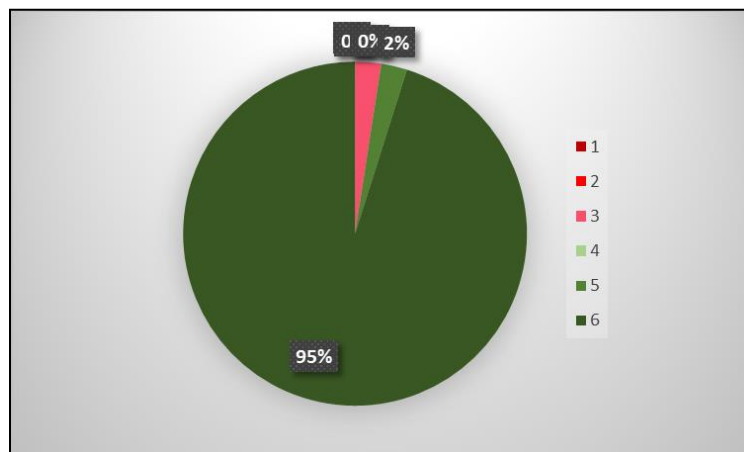
Data yang digunakan dalam analisis rasio penduduk miskin dengan tingkat kesejahteraan terendah adalah data penduduk miskin ekstrim, dimana jika dibandingkan dengan jumlah Tahun 2022 sebanyak 2.298 jiwa turun menjadi 1.827 jiwa di Tahun 2023.

Berdasarkan data hasil analisis individu terdapat hanya 1 kelurahan yang memiliki rasio rumah tangga dengan dengan tingkat kesejahteraan terendah Prioritas 1 yaitu Kelurahan Nitu yang berada di Kecamatan Raba, sementara kelurahan lainnya berada pada kategori tahan pangan (prioritas 4, 5 dan 6). Meskipun demikian program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin di Kota Bima tetap harus ditingkatkan.

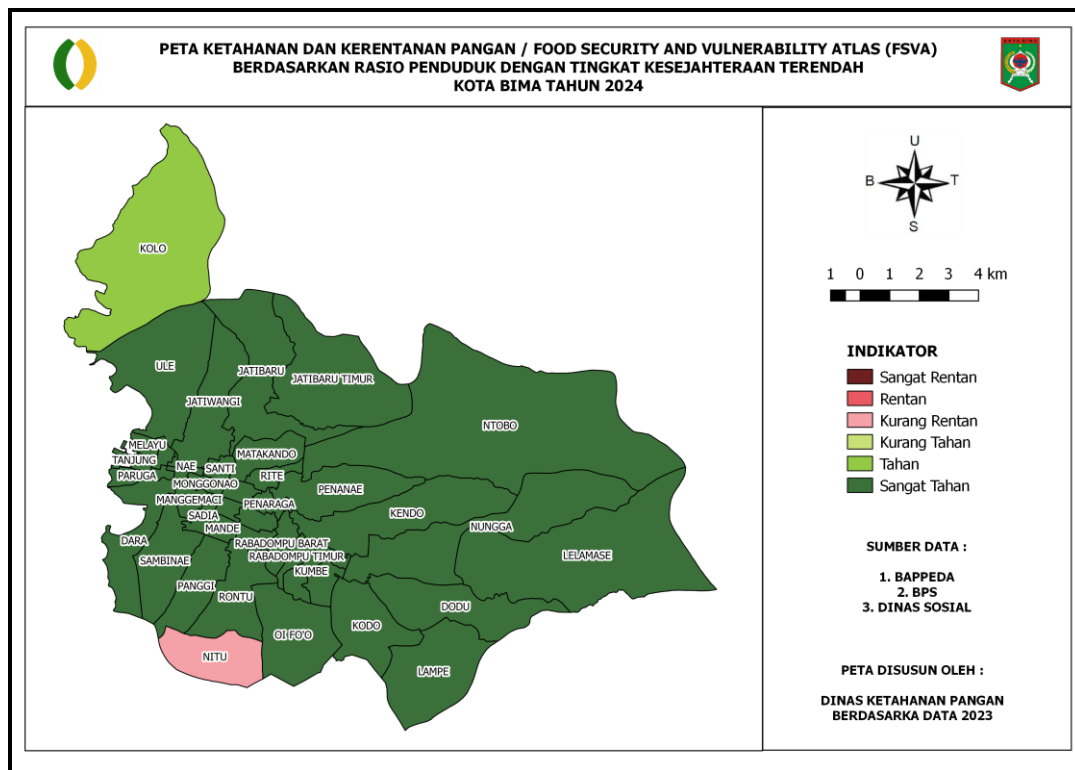
Tabel 9. Sebaran Kelurahan Dengan Tingkat Kesejahteraan Terendah Berdasarkan Skala Prioritas

Prioritas	Range	Jumlah Kelurahan	Persentase
1	0,2933	0	0,00
2	0,1646	0	0,00
3	0,1022	1	2,44
4	0,0572	0	0,00
5	0,0330	1	2,44
6	< 0,0330	39	95,12

Grafik 6. Sebaran Kelurahan Dengan Tingkat Kesejahteraan Terendah Berdasarkan Skala Prioritas



Peta FSVA Berdasarkan Penduduk Miskin



3.2 AKSES TRANSPORTASI

Kurangnya akses terhadap infrastruktur menyebabkan kemiskinan, dimana masyarakat yang tinggal di daerah terisolir atau terpencil dengan kondisi geografis yang sulit dan ketersediaan pasar yang buruk kurang memiliki kesempatan ekonomi dan pelayanan jasa yang memadai. Dengan kata lain, kelompok miskin ini masih kurang mendapatkan akses terhadap program pembangunan pemerintah. Investasi pada infrastruktur, khususnya infrastruktur transportasi (jalan, pelabuhan, bandara dan lain-lain), listrik, infrastruktur pertanian (irigasi), fasilitas pendidikan dan kesehatan dapat sepenuhnya mengubah suatu wilayah sehingga menciptakan landasan pertumbuhan ekonomi dan partisipasi yang lebih besar dari masyarakat yang tinggal di daerah terpencil.

Pada sektor pertanian, faktor yang menyebabkan tingkat pendapatan yang rendah adalah rendahnya harga komoditas pertanian di tingkat petani/produsen (*farm gate price*) di daerah perdesaan dibandingkan dengan harga di perkotaan untuk komoditas dengan kualitas sama (komoditas belum diubah atau diproses). Rendahnya harga komoditas pertanian ditingkat petani merupakan akibat dari tingginya biaya transportasi untuk pemasaran hasil pertanian dari desa surplus. Biaya transportasi akan lebih tinggi pada moda kendaraan bermotor-melewati jalan setapak dan jalan kecil dengan tenaga manusia atau hewan, misalnya pada daerah yang tidak memiliki akses jalan yang memadai. Dalam sebuah kajian cepat mengenai penyebab kemiskinan pada desa terpencil di 5 kabupaten di Indonesia diketahui bahwa tingginya biaya transportasi merupakan penyebab utama terjadinya kemiskinan tersebut. Tingginya harga komoditas pertanian di tingkat petani akan meningkatkan pendapatan yang diterima oleh masyarakat petani. Walaupun demikian, peningkatan pendapatan saja tanpa dibarengi dengan perbaikan akses terhadap pelayanan jasa dan infrastruktur belum cukup untuk menjamin kesejahteraan

masyarakat petani. Keterbelakangan infrastruktur menghalangi laju perkembangan suatu wilayah. Infrastruktur yang lebih baik akan menarik investasi yang lebih besar pada berbagai sektor, yang pada akhirnya dapat menjadi daya dorong bagi kehidupan yang berkelanjutan.

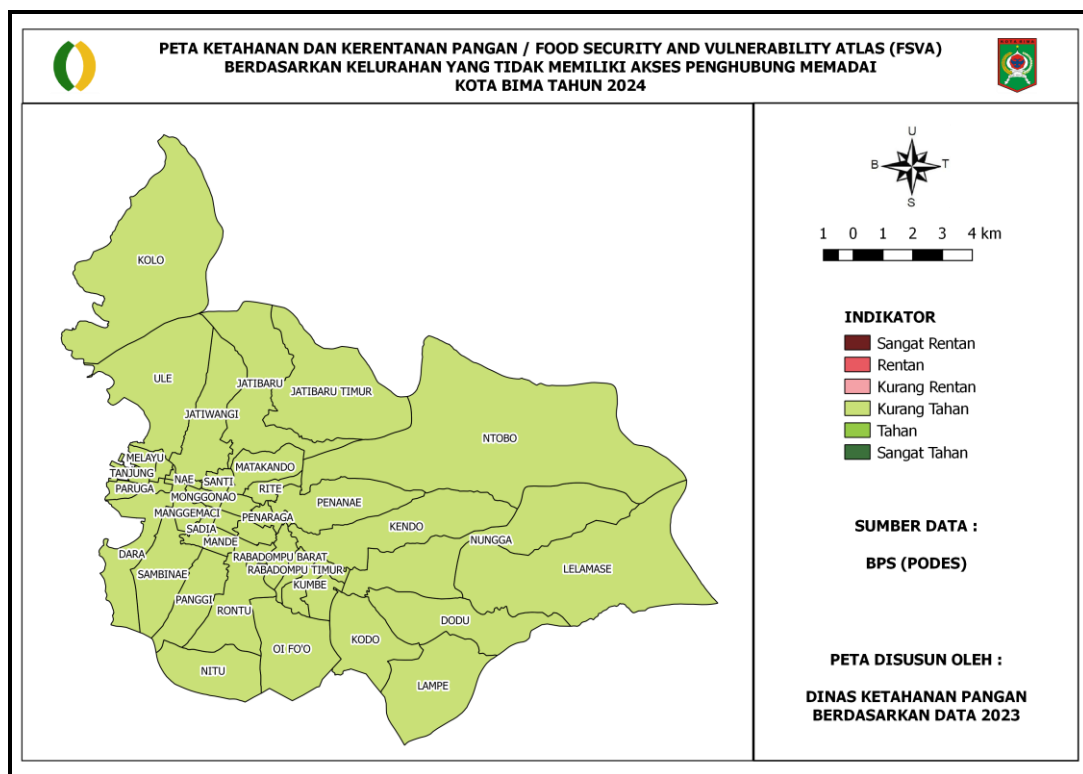
Berdasarkan data PODES (Potensi Desa) 2022 yang dikeluarkan BPS dan Data dari Dinas Perhubungan dan PUPR Kota Bima bahwa semua kelurahan yang ada di Kota Bima memiliki akses penghubung bagi kendaraan roda 4 sepanjang tahun.

3.3 Strategi Peningkatan Akses Pangan

Strategi Pemerintah Daerah Kota Bima untuk menanggulangi kemiskinan diantaranya:

1. Mempercepat pemenuhan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat miskin.
2. Mendorong tumbuh dan berkembangnya lembaga keuangan mikro dan sarana pendukung perekonomian sampai tingkat kelurahan.
3. Mendorong tumbuh dan berkembangnya sentra agribisnis.
4. Mendorong pemerataan pembangunan infrastruktur antar kelurahan.

Peta FSVA Berdasarkan Akses Penghubung



BAB 4

PEMANFAATAN PANGAN

Aspek ketiga dari konsep ketahanan pangan adalah pemanfaatan pangan. Pemanfaatan pangan meliputi: (1) Pemanfaatan pangan yang bisa di akses oleh rumah tangga; dan (2) Kemampuan individu untuk menyerap zat gizi secara efisien oleh tubuh. Pemanfaatan pangan juga meliputi cara penyimpanan, pengolahan, dan penyajian makanan termasuk penggunaan air selama proses pengolahannya serta kondisi budaya atau kebiasaan dalam pemberian makanan terutama kepada individu yang memerlukan jenis pangan khusus sesuai dengan kebutuhan masing-masing individu (saat masa pertumbuhan, kehamilan, menyusui, dll) atau status kesehatan masing-masing individu. Dalam penyusunan FSVA Kota Bima, aspek pemanfaatan pangan meliputi indikator sebagai berikut : (1) Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga; dan (2) Rasio jumlah penduduk kelurahan per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk.

4.1 AKSES TERHADAP AIR BERSIH

Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga merupakan perbandingan antara jumlah rumah tangga dengan sumber air bersih tidak terlindung dengan jumlah rumah tangga. Air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak³. Sumber air bersih yang tidak terlindungi berpotensi meningkatkan angka kesakitan serta menurunkan kemampuan dalam menyerap makanan yang pada akhirnya akan mempengaruhi status gizi individu.

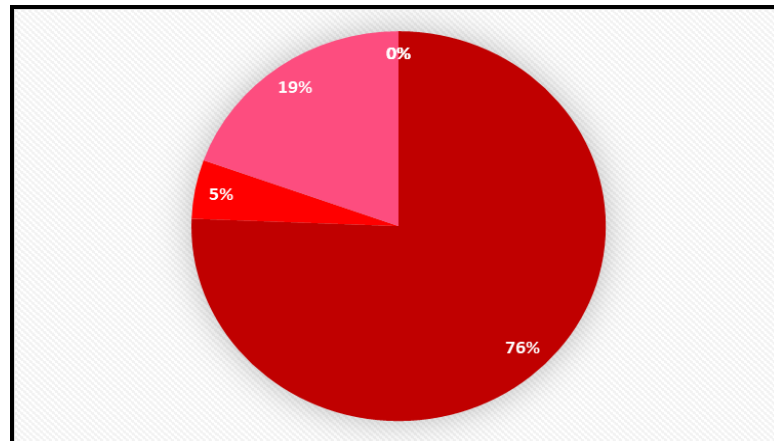
Tabel 10. Sebaran Kelurahan Berdasarkan Rumah Tangga Tanpa Akses Air Bersih Berdasarkan Skala Prioritas.

Prioritas	Range	Jumlah Kelurahan	Persentase
1	0,0094	31	75,60
2	0,0063	2	04,87
3	0,0012	8	19,51
4	0,0011	0	00,00
5	0,0000	0	00,00
6	<0,0000	0	00,00

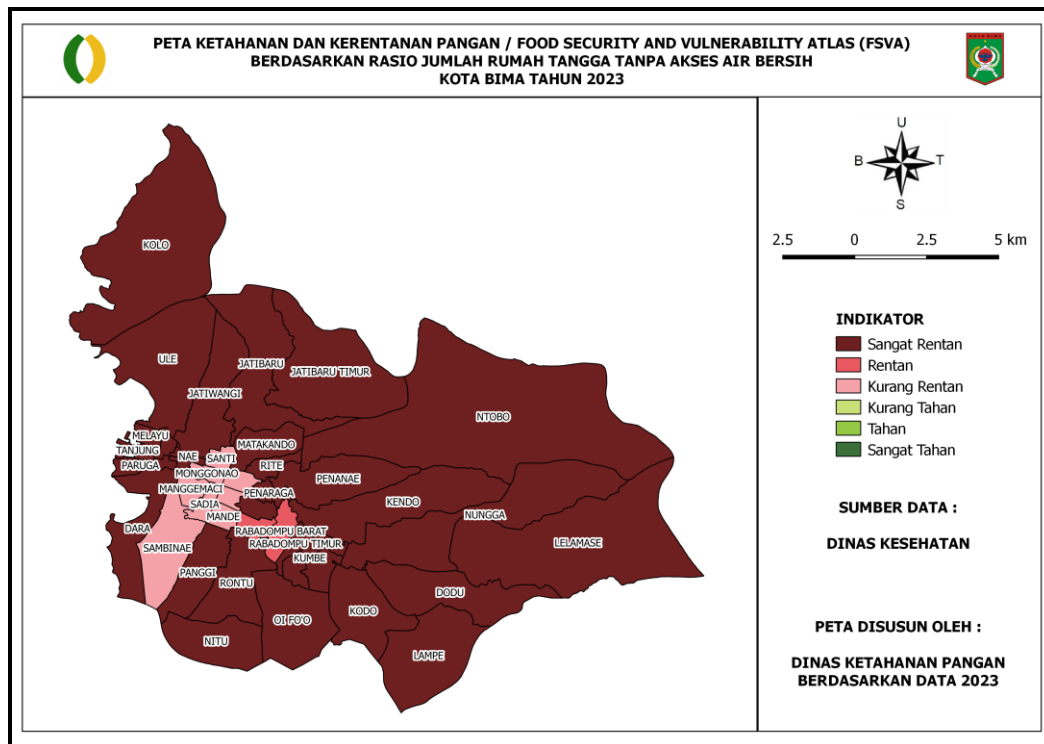
Berdasarkan hasil analisis rasio rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga prioritas 1-3 paling banyak berada di Kecamatan Raba sebanyak 11 kelurahan yaitu Nitu, Rontu, Rabangodu Selatan, Rabangodu Utara, Penaraga, Rabadompui Barat, Rabadompui Timur, Kendo, Penanae, Rite dan Ntobo. Kemudian di Kecamatan Mpunda sebanyak 10 kelurahan yaitu Sambinae, Panggi, Mande, Sadia, Manggemaci, Monggonao, Lewirato, Penatoi, Santi dan Matakando. Kemudian di Kecamatan Rasanae Timur sebanyak 8 kelurahan yaitu Lampe, Dodu, Nungga, Kumba, Oi Fo'o, Kodo, Lelamase dan Oimbo. Selanjutnya di Kecamatan Rasanae Barat sebanyak 6 kelurahan yaitu Paruga, Tanjung, Sarae, Nae, Dara dan Pane. Kecamatan Asakota sebanyak 6 kelurahan yaitu Melayu, Jatiwangi, Jatibaru, Kolo, Ule dan Jatibaru Timur.

³ Permenkes 416 Tahun 1990

Grafik 7. Sebaran Kelurahan Berdasarkan Rumah Tangga Tanpa Akses Air Bersih Berdasarkan Skala Prioritas



Peta FSVA Berdasarkan Indikator Rasio RT Tanpa Akses Air Bersih



4.2 RASIO TENAGA KESEHATAN

Rasio jumlah penduduk kelurahan per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk adalah jumlah penduduk kelurahan per tenaga kesehatan yang terdiri dari: (1) Dokter umum/spesialis; (2) Dokter gigi; (3) Bidan; dan (4) Tenaga kesehatan lainnya (perawat, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga gizi, apoteker/asisten apoteker) dibandingkan dengan kepadatan penduduk. Tenaga kesehatan berperan penting dalam menurunkan angka kesakitan penduduk (morbiditas) dan

meningkatkan pengetahuan masyarakat akan pentingnya makanan yang beragam bergizi seimbang dan aman.

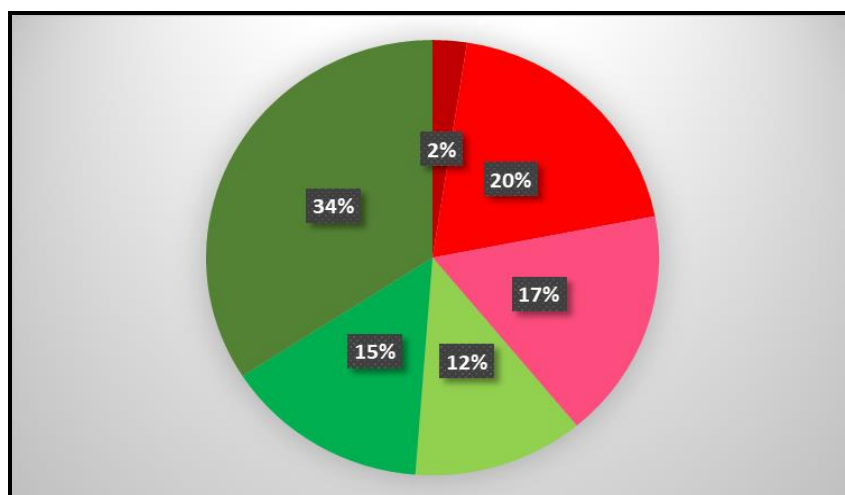
Rasio jumlah penduduk kelurahan per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk menunjukkan kemampuan jumlah tenaga kesehatan yang ada di wilayah kelurahan untuk melayani masyarakat. Jumlah tenaga kesehatan yang memadai akan meningkatkan status pemanfaatan pangan masyarakat.

Berdasarkan hasil analisa indikator rasio tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk untuk prioritas 1-3 sebanyak 14 kelurahan, paling banyak berada di Kecamatan Rasanae Timur sebanyak 6 kelurahan yaitu Lampe, Dodu, Nungga, Oi Fo'o, Kodo dan Lelamase. Kemudian di Kecamatan Raba sebanyak 5 kelurahan yaitu Nitu, Rontu, Kendo, Penanae dan Ntobo. Selanjutnya di Kecamatan Asakota sebanyak 3 kelurahan yaitu Jatiwangi, Kolo dan Jatibaru Timur. Di Kecamatan Mpunda 1 kelurahan yaitu di kelurahan Sambinae. Rasanae Barat sebanyak 1 kelurahan yaitu Dara.

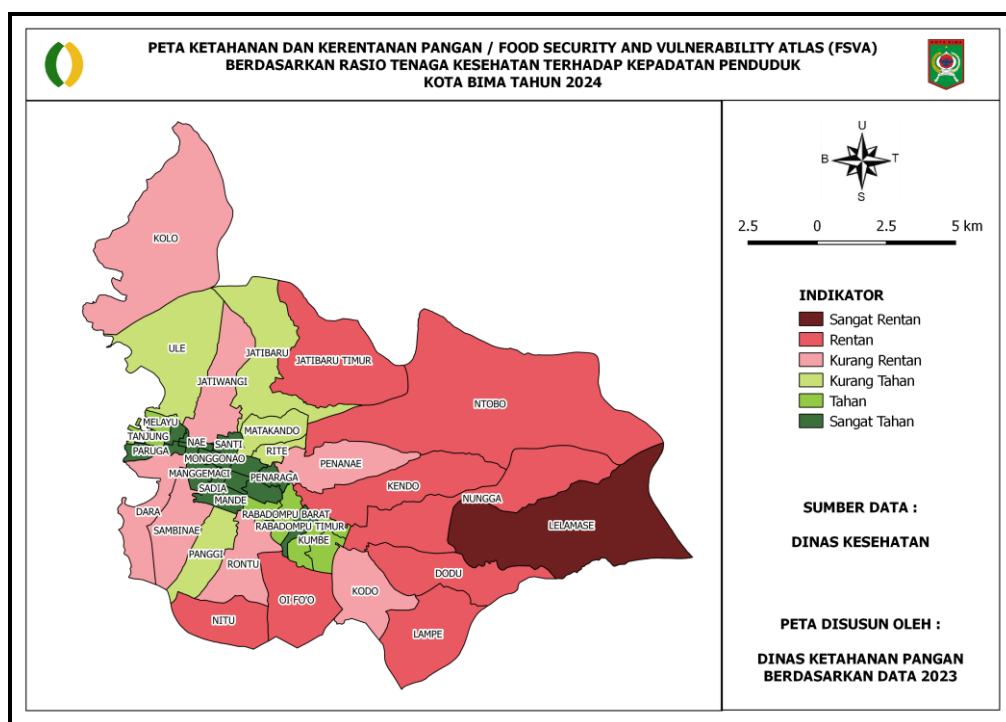
Tabel 11. Sebaran Rasio Tenaga Kesehatan Di kelurahan Berdasarkan Skala Prioritas

Prioritas	Range	Jumlah Kelurahan	Persentase
1	1,9138	1	2,44
2	0,8328	8	19,51
3	0,1801	7	17,07
4	0,0643	5	12,20
5	0,0352	6	14,63
6	<0,0352	14	34,15

Grafik 8. Sebaran Rasio Tenaga Kesehatan Di kelurahan Berdasarkan Skala Prioritas



Peta FSVA Berdasarkan Indikator Rasio Tenaga Kesehatan



4.3 DAMPAK (OUTCOME) DARI STATUS KESEHATAN

Ketahanan pangan merupakan salah satu aspek yang mempengaruhi status kesehatan dan gizi masyarakat. Status gizi anak ditentukan oleh asupan makanan dan penyakit yang dideritanya. Status gizi anak balita diukur dengan 3 indikator yaitu:

1. Berat Badan Kurang dan Berat Badan Sangat Kurang yang biasa dikenal dengan underweight (berat badan berdasarkan umur (BB/U) dengan Zscore dari-2 dari median menurut referensi WHO 2005, yang mengacu kepada gabungan dari kurang gizi akut dan kronis);
2. Pendek atau stunting (tinggi badan berdasarkan umur (TB/U) dengan Zscore kurang dari-2 dari median menurut referensi WHO 2005, yang mengacu ke kurang gizi kronis jangka panjang); dan
3. Kurus atau wasting (berat badan berdasarkan tinggi badan (BB/TB) dengan Zscore kurang dari-2 dari median menurut referensi WHO 2005, yang mengacu kepada kurang gizi akut atau baru saja mengalami kekurangan gizi).

Menurut data dari Dinas Kesehatan Kota Bima, bahwa jumlah balita stunting tiga tahun terakhir (2021-2023) mengalami penurunan dari 1.796 (17,56%) jiwa menjadi 1.295 (11,32%), namun jumlah balita gizi buruk mengalami fluktuasi dimana tahun 2021 sebanyak 810 jiwa (7,90%), tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 1045 jiwa (8,65%) sampai tahun 2023 menjadi 8,87% atau sebanyak 1014 jiwa.

Tabel 12. Jumlah Balita Stunting dan Gizi Buruk

NO	TAHUN	JUMLAH BALITA				SUMBER DATA
		STUNTING	%	GIZI BURUK	%	
1	2021	1.796	17.56	810	7.90	EPPGBM BULAN DESEMBER
2	2022	1.656	13.70	1045	8.65	EPPGBM BULAN DESEMBER
3	2023	1.295	11.32	1014	8.87	EPPGBM BULAN DESEMBER

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Bima Tahun 2023

Angka kematian balita dan ibu saat melahirkan merupakan dampak dari status kesehatan dan gizi. Angka kematian balita di Kota Bima Tahun 2023 adalah 19 jiwa 177/100.000 KH. Sementara angka kematian ibu saat melahirkan di Kota Bima pada Tahun 2023 adalah 5 jiwa 6/1000 KH.

Tabel 13. Jumlah Kematian Balita dan Ibu Saat Melahirkan per Kecamatan

No.	Kecamatan	Jumlah Kematian Balita	Jumlah Kematian Ibu Saat Melahirkan	Jumlah
1	Rasanae Barat	4	1	5
2	Mpunda	4	0	1
3	Rasanae Timur	5	2	11
4	Raba	5	1	2
6	Asakota	1	1	5
	Total	19	5	24

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kota Bima Tahun 2023

Grafik 9. Kematian Balita dan Ibu Saat Melahirkan per Kecamatan



4.4. Strategi Peningkatan Pemanfaatan Pangan

Masalah gizi kronis (stunting) menjadi perhatian penting Pemerintah Kota Bima, masalah gizi kronis merupakan akibat kurang optimalnya pertumbuhan janin dan bayi di usia dua tahun pertama kehidupannya, terutama gabungan dari kurangnya asupan gizi, paparan terhadap penyakit yang tinggi serta pola pengasuhan yang kurang tepat. Semua faktor ini dapat menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki, yang akhirnya dapat menyebabkan meningkatnya beban penyakit dan kematian pada balita.

Kurang gizi pada usia dini, terutama stunting dapat menghambat perkembangan fisik dan mental yang akhirnya mempengaruhi prestasi dan tingkat kehadiran di sekolah. Anak yang kurang gizi lebih cenderung untuk masuk sekolah lebih lambat dan lebih cepat putus sekolah. Dampak ke masa depannya adalah mempengaruhi potensi kemampuan mencari nafkah, sehingga sulit keluar dari lingkaran kemiskinan. Anak yang menderita kurang berat badan menurut umur (kurang gizi) dan secara cepat berat badannya meningkat, maka pada saat dewasa cenderung untuk menderita penyakit kronik yang terkait gizi (kencing manis, tekanan darah tinggi dan penyakit jantung koroner). Dampak jangka panjang, oleh kurang gizi pada masa anak-anak juga menyebabkan rendahnya tinggi badan dan pada ibu-ibu dapat melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR), yang akhirnya menyebabkan terulangnya lingkaran masalah ini pada generasi selanjutnya.

Untuk menurunkan prevalensi stunting, maka intervensi gizi harus segera direncanakan dan dilakukan secara efektif pada semua tingkatan, mulai dari rumah tangga sampai tingkat nasional. Untuk mencegah dan mengatasi masalah kekurangan gizi secara efektif, perlu prioritas untuk kelompok rentan gizi, memahami penyebab kurang gizi adalah multidimensi, intervensi yang tepat dan efektif untuk mengatasi penyebabnya, dan meningkatkan komitmen serta investasi dalam bidang gizi. Berikut ini adalah rekomendasi untuk mengatasi masalah gizi:

1. Fokus pada kelompok rentan gizi, termasuk:

- a. Anak usia di bawah dua tahun. Usia dua tahun pertama di dalam kehidupan adalah usia yang paling kritis sehingga disebut “jendela peluang (*window of opportunity*)” karena mencegah kurang gizi pada usia ini akan sangat berarti untuk kelompok ini pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Meskipun kerusakan sudah terjadi dan seharusnya dihindari sejak dari usia 9 bulan sampai usia 24 bulan, kerentanan anak terhadap penyakit dan resiko kematian masih tinggi di usia lima tahun pertama. Itulah sebabnya banyak intervensi kesehatan dan gizi yang difokuskan pada anak di bawah lima tahun. Intervensi kesehatan dan gizi harus difokuskan pada anak di bawah dua tahun, akan tetapi apabila anggaran memadai maka perlu dilakukan juga untuk anak di bawah lima tahun.
- b. Anak-anak kurang gizi ringan. Kelompok ini memiliki resiko lebih tinggi untuk meninggal karena meningkatnya kerentanan terhadap infeksi. Anak yang terdeteksi kurang gizi seharusnya di rawat dengan tepat untuk mencegah mereka menjadi gizi buruk.
- c. Ibu hamil dan menyusui, karena kelompok ini memerlukan kecukupan gizi bagi pertumbuhan dan perkembangan janin, dan untuk menghasilkan ASI (Air Susu Ibu) untuk bayi mereka.
- d. Kurang gizi mikro untuk semua kelompok umur, terutama pada anak-anak, ibu hamil dan menyusui. Kekurangan gizi mikro pada semua kelompok umur cukup tinggi disebabkan

karena asupan karbohidrat yang tinggi, rendahnya asupan protein (hewani) sayur dan buah serta makanan yang berfortifikasi. Pada kondisi ini biasanya prevalensi stunting pada balita juga cukup tinggi.

2. Perencanaan dan penerapan intervensi multi-sektoral untuk mengatasi TIGA penyebab dasar kekurangan gizi (pangan, kesehatan dan pengasuhan). Satu sektor saja (sektor kesehatan atau pendidikan atau pertanian) tidak dapat mengatasi masalah gizi secara efektif karena masalah tersebut adalah multi sektor.

- a. Intervensi langsung dengan manfaat langsung terhadap gizi (terutama melalui Sektor Kesehatan):

- Memperbaiki gizi dan pelayanan ibu hamil, terutama selama 2 trimester pertama usia kehamilan: makan lebih sering, beraneka ragam, dan bergizi; minum pil zat besi atau menggunakan suplemen gizi mikro tabor (Sprinkle) setiap hari; memeriksakan kehamilan sekurangnya 4 kali selama periode kehamilan.
- Promosi menyusui ASI selama 0-24 bulan: inisiasi menyusui dini segera sesudah bayi lahir; menyusui ASI eksklusif sampai 6 bulan pertama, melanjutkan pemberian ASI sampai 24 bulan; melanjutkan menyusui walaupun anak sakit.
- Meningkatkan pola pemberian makanan tambahan untuk anak usia 6-24 bulan; mulai pemberian makanan tambahan sejak anak berusia 7 bulan; pemberian makanan lebih sering, jumlah sedikit, beraneka ragam dan bergizi (pangan hewani, telur, kacang-kacangan, polong-polongan, kacang tanah, sayur, buah dan minyak); hindari pemberian jajan yang tidak sehat.
- Pemantauan berat dan tinggi badan bayi 0-24 bulan atau jika sumber daya memungkinkan, untuk anak 0-59 bulan secara teratur, untuk mendeteksi kurang gizi secara dini sehingga bisa dilakukan intervensi sedini mungkin. Meningkatkan komunikasi mengenai berat badan anak, cara mencegah dan memperbaiki kegagalan berat dan tinggi anak dengan keluarga.
- Mengatasi masalah kurang gizi akut pada balita dengan menyediakan fasilitas dan manajemen berbasis masyarakat berdasarkan pedoman dari WHO/UNICEF dan Departemen Kesehatan.
- Memperbaiki asupan gizi mikro : promosi garam beryodium; penganekaragaman asupan makanan; fortifikasi makanan; pemberian pil zat besi untuk ibu hamil; pemberian vitamin A setiap 6 bulan sekali untuk anak 6-24 bulan (atau anak 6-59 bulan jika alokasi anggaran mencukupi), serta ibu menyusui dalam jangka waktu 1 bulan setelah melahirkan atau masa nifas; pemberian obat cacing.

- b. Intervensi tidak langsung dengan manfaat tidak langsung terhadap gizi (terutama melalui sektor di luar kesehatan).

3. Prioritas dan peningkatan investasi serta komitmen dalam hal gizi untuk mengatasi masalah gizi.

Dampak ekonomi akibat kekurangan gizi pada anak-anak adalah sangat tinggi. Kekurangan gizi pada anak akan menyebabkan hilangnya produktivitas pada masa dewasa, dan tingginya biaya pelayanan kesehatan dan pendidikan. Ada beberapa macam bentuk dari malnutrisi pada masa anak-anak yang dapat menyebabkan hilangnya produktivitas mereka pada masa dewasa yang berkaitan dengan rendahnya kemampuan kognitif. Kekurangan energi-protein berkontribusi sebesar 10% dari hilangnya produktivitas pada masa dewasa, kekurangan zat besi (anemia) berkontribusi sebesar 4% dan kekurangan zat yodium sebesar 10%. Malnutrisi pada masa anak-anak juga berpotensi menyebabkan hilangnya produktivitas tenaga kerja kasar.

Investasi di bidang gizi merupakan salah satu jenis intervensi pembangunan yang paling efektif dari segi biaya, karena memiliki rasio manfaat biaya yang tinggi, bukan hanya untuk individu, tetapi juga pembangunan negara yang berkelanjutan, sebab intervensi ini dapat melindungi kesehatan, mencegah kecacatan dan dapat memacu produktivitas ekonomi dan menjaga kelangsungan hidup.

BAB 5

KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN KOMPOSIT

Sebagaimana disebutkan di dalam Bab 1, bahwa kondisi kerentanan terhadap kerawanan pangan kronis secara komposit ditentukan berdasarkan 6 indikator yang berhubungan dengan ketersediaan pangan, akses pangan dan penghidupan, serta pemanfaatan pangan dan gizi, yang dijelaskan secara rinci pada Bab Dua, Tiga dan Empat. Peta kerentanan terhadap kerawanan pangan komposit (Peta 6.1) ditetapkan melalui Analisis Pembobotan.

5.1. KONDISI KETAHANAN PANGAN

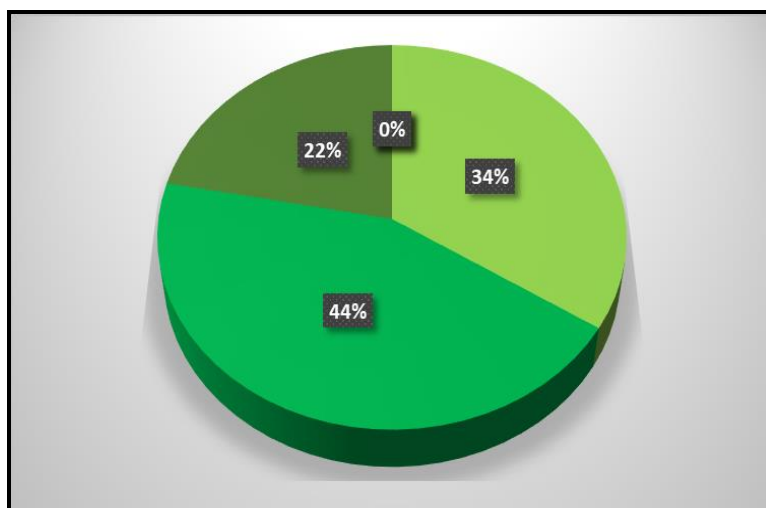
Peta komposit menjelaskan kondisi kerentanan terhadap kerawanan pangan suatu wilayah (kecamatan) yang disebabkan oleh kombinasi dari berbagai dimensi kerawanan pangan. Berdasarkan hasil pembobotan, kelurahan-kelurahan dikelompokkan ke dalam 6 prioritas. Prioritas 1 merupakan prioritas utama yang menggambarkan tingkat kerentanan yang paling tinggi, sedangkan prioritas 6 merupakan prioritas yang relatif lebih tahan pangan. Dengan kata lain, wilayah (kelurahan) prioritas 1 memiliki tingkat resiko kerentanan terhadap kerawanan pangan yang lebih besar dibandingkan wilayah (kelurahan) lainnya sehingga memerlukan perhatian segera. Meskipun demikian, wilayah (kelurahan) yang berada pada prioritas 1 tidak berarti semua penduduknya berada dalam kondisi rawan pangan, juga sebaliknya wilayah (kelurahan) pada prioritas 6 tidak berarti semua penduduknya tahan pangan.

Berdasarkan hasil analisis komposit 6 indikator ketahanan dan kerentanan pangan, dari 41 kelurahan yang ada di Kota Bima, tidak ada kelurahan yang masuk dalam kategori rentan pangan (Prioritas 1, 2 dan 3), namun 41 kelurahan masuk pada kategori tahan pangan Dimana Prioritas 4 sebanyak 14 kelurahan, Prioritas 5 sebanyak 18 kelurahan dan Prioritas 6 sebanyak 9 kelurahan.

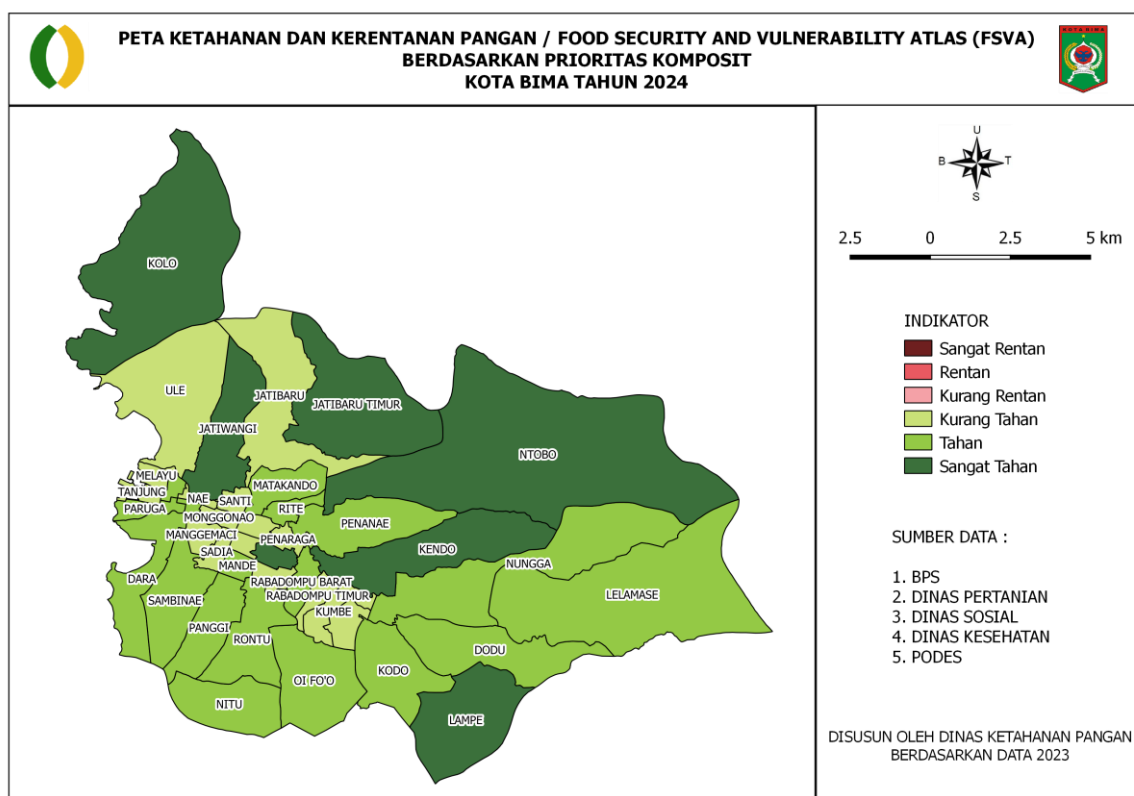
Tabel 14. Sebaran Jumlah Kelurahan Berdasarkan Prioritas Komposit

Prioritas	Jumlah Kelurahan	Persentase
1	0	00,00
2	0	00,00
3	0	00,00
4	14	34,15
5	18	43,90
6	9	21,95

Grafik Sebaran Perentase Kelurahan Berdasarkan Prioritas



Peta FSVA Komposit Ketahanan dan Kerentanan Pangan Berdasarkan Prioritas Per Kelurahan



5.2. FAKTOR PENYEBAB KERENTANAN PANGAN

Berdasarkan hasil analisis komposit, Kota Bima tidak berada di wilayah dengan kategori rentan rawan pangan, namun secara umum kelurahan rentan terhadap kerawanan pangan berturut-turut disebabkan oleh : (1) Jumlah Rumah Tangga Tanpa Akses Air Bersih yang cukup tinggi, (2) Prasarana dan sarana penyedia pangan belum memadai, (3) Luas lahan pertanian yang semakin kecil, dan (4) Jumlah tenaga kesehatan yang belum memadai.

BAB 6

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Penyebab kerentanan terhadap kerawanan pangan pada suatu wilayah berbeda dengan wilayah lainnya, dengan demikian cara penyelesaiannya juga berbeda. Peta ini membantu memahami keadaan diantara wilayah (kelurahan), dan dengan demikian akan membantu para pengambil kebijakan untuk dapat menentukan langkah-langkah yang tepat dalam menangani isu-isu ketahanan pangan yang relevan di wilayahnya.

Berdasarkan hasil analisis komposit terhadap 6 indikator kerentanan pangan di Kota Bima tidak ditemukan wilayah rentan rawan pangan maka fokus lokasi penanganan kerentanan pangan di wilayah kelurahan diprioritaskan pada hasil analisis individu masing-masing indikator yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan.

Upaya-upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan ditekankan pada penyebab utama kerentanan pangan di kelurahan seperti digambarkan pada diagram di bawah ini.



Program-program peningkatan ketahanan pangan dan penanganan kerentanan pangan wilayah Kota Bima diarahkan pada kegiatan :

- a. Peningkatan penyediaan pangan dengan meningkatkan produktivitas lahan pertanian, mengoptimalkan sumber daya pangan lokal dan kebijakan suplay demand.
- b. Penanganan kemiskinan melalui penyediaan lapangan kerja, padat karya dan pemberian bantuan sosial serta pembangunan usaha produktif/UMKM/padat karya untuk menggerakkan ekonomi wilayah;
- c. Peningkatan akses air bersih melalui penyediaan fasilitas dan layanan air bersih;
- d. Penyediaan dan peningkatan jumlah dan kesejahteraan tenaga kesehatan.

BAB 7

PENUTUP

Demikian Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kota Bima Tahun 2024 di susun, semoga menjadi pedoman dan landasan pengambilan kebijakan, perencanaan program dan kegiatan bagi stakholder dalam meningkatkan ketahanan pangan dan mengatasi wilayah-wilayah kelurahan yang berada di kategori rentan rawan pangan di Kota Bima.



Lampiran 1.

DATA ANALISIS FSVA KOTA BIMA TAHUN 2024

No.	Nama Kecamatan	Nama Kelurahan	Luas Lahan Pertanian	Jumlah Sarana & Prasarana Penyedia Pangan	Jumlah Pddk Tingkat Kesejahteraan Terendah	Desa Tanpa Akses Penghubung Memadai	Jumlah RT Tanpa Akses Air Bersih	Jumlah Tenaga Kesehatan	Luas Wilayah Desa (Ha)	Jumlah Penduduk Desa	Jumlah Rumah Tangga	Tingkat Kepadatan Penduduk
1	RASANAE BARAT	PARUGA	32,00	168	5	1	21	30	91,00	5.250	1.757	5.769,23
2	RASANAE BARAT	TANJUNG	6,00	155	13	1	55	22	79,00	6.379	2.060	8.074,68
3	RASANAE BARAT	SARAE	3,00	197	103	1	16	36	48,00	5.122	1.636	10.670,83
4	RASANAE BARAT	NAE	6,00	85	37	1	15	30	31,00	4.319	1.375	13.932,26
5	RASANAE BARAT	DARA	448,00	277	36	1	57	32	734,00	6.870	2.190	935,97
6	RASANAE BARAT	PANE	4,00	108	5	1	9	18	31,00	2.671	924	8.616,13
7	MPUNDA	SAMBINAE	448,20	41	34	1	4	22	504,00	3.612	1.135	716,67
8	MPUNDA	PANGGI	291,68	45	0	1	9	21	369,00	2.778	868	752,85
9	MPUNDA	MANDE	45,08	77	8	1	5	33	77,60	2.908	925	3.747,42
10	MPUNDA	SADIA	29,86	50	49	1	4	45	71,60	3.790	1.134	5.293,30
11	MPUNDA	MANGGEMACI	9,59	85	24	1	3	28	51,00	4.174	1.319	8.184,31
12	MPUNDA	MONGGONAO	10,60	60	0	1	4	40	60,60	4.095	1.305	6.757,43
13	MPUNDA	LEWIRATO	10,05	34	9	1	1	14	48,60	2.014	640	4.144,03
14	MPUNDA	PENATOI	12,52	64	37	1	6	33	71,60	4.825	1.485	6.738,83
15	MPUNDA	SANTI	15,78	37	5	1	3	40	72,00	2.828	847	3.927,78
16	MPUNDA	MATAKANDO	157,00	68	76	1	11	18	202,00	3.026	909	1.498,02
17	RASANAE TIMUR	LAMPE	708,34	18	9	1	7	5	734,30	1.627	525	221,57
18	RASANAE TIMUR	DODU	631,87	45	58	1	30	6	789,90	3.296	1.103	417,27
19	RASANAE TIMUR	NUNGA	1.132,50	20	20	1	41	7	1.159,00	2.521	802	217,52
20	RASANAE TIMUR	KUMBE	58,80	58	11	1	39	20	98,00	3.922	1.345	4.002,04
21	RASANAE TIMUR	OI FO'O	890,00	15	45	1	114	9	920,00	2.262	720	245,87
22	RASANAE TIMUR	KODO	531,20	18	13	1	9	27	566,00	2.253	754	398,06
23	RASANAE TIMUR	LELAMASE	2.056,00	19	0	1	35	5	2.084,80	2.082	723	99,87
24	RASANAE TIMUR	OIMBO	31,00	28	7	1	47	9	55,00	1.870	647	3.400,00
25	RABA	NITU	595,00	16	184	1	36	5	619,00	1.561	512	252,18
26	RABA	RONTU	412,02	41	15	1	22	16	474,00	3.323	1.107	701,05
27	RABA	RABANGODU SELATAN	19,19	67	6	1	11	31	139,00	4.072	1.299	2.929,50
28	RABA	RABANGODU UTARA	24,16	332	0	1	22	174	98,00	4.907	1.600	5.007,14
29	RABA	PENARAGA	22,33	127	39	1	31	44	73,00	5.219	1.648	7.149,32
30	RABA	RABADOMPU BARAT	46,69	150	10	1	17	40	161,00	5.278	1.818	3.278,26
31	RABA	RABADOMPU TIMUR	20,54	66	21	1	18	20	64,00	3.810	1.289	5.953,13
32	RABA	KENDO	860,37	29	13	1	17	8	908,00	1.600	544	176,21
33	RABA	PENANAE	456,97	65	36	1	31	25	534,00	4.250	1.351	795,88
34	RABA	RITE	131,42	63	16	1	30	17	184,00	2.443	762	1.327,72
35	RABA	NTOBO	3.000,76	48	74	1	76	19	3.119,00	3.953	1.314	126,74
36	ASAKOTA	MELAYU	6,00	116	102	1	169	16	76,00	5.833	1.784	7.675,00
37	ASAKOTA	JATIWANGI	1.497,21	221	62	1	23	77	1.571,00	7.659	2.333	487,52
38	ASAKOTA	JATIBARU	241,94	186	155	1	248	31	294,00	6.098	1.990	2.074,15
39	ASAKOTA	KOLO	2.616,74	149	249	1	140	42	2.675,00	6.234	1.867	233,05
40	ASAKOTA	ULE	365,00	118	170	1	244	30	386,00	6.655	1.864	1.724,09
41	ASAKOTA	JATIBARU TIMUR	1.874,00	55	71	1	56	21	1.901,00	4.188	1.388	220,31
TOTAL			19.759,41	3.621	1.827	41	1.736	1.166	22.225,00	161.577	51.598	138.873,16

Lampiran 2.

HASIL ANALISIS FSVA KOTA BIMA TAHUN 2024

No.	Nama Kec	Kode Kec	Kode Desa	Nama Desa	1. P.Lahan	2. P.Sarana	3. P.Tdk Sejah	4. P.Jalan	5. P.NoWater	6. P.Tenkes	INDEKS KOM	PERINGKAT	PRIO KOMP
1	RASANA BARAT	5272010	5272010004	PARUGA	2	5	6	4	1	6	72,74	17	5
2	RASANA BARAT	5272010	5272010005	TANJUNG	2	4	6	4	1	5	70,32	28	4
3	RASANA BARAT	5272010	5272010006	SARAE	2	6	6	4	1	6	74,46	13	5
4	RASANA BARAT	5272010	5272010007	NAE	2	3	6	4	1	6	69,81	29	4
5	RASANA BARAT	5272010	5272010009	DARA	3	6	6	4	1	3	76,81	9	5
6	RASANA BARAT	5272010	5272010010	PANE	2	6	6	4	1	6	74,41	14	5
7	MPUNDA	5272011	5272011001	SAMBINAE	4	2	6	4	3	3	72,49	19	5
8	MPUNDA	5272011	5272011002	PANGGI	4	2	6	4	1	4	72,90	16	5
9	MPUNDA	5272011	5272011003	MANDE	3	4	6	4	3	6	72,33	22	5
10	MPUNDA	5272011	5272011004	SADIA	2	2	6	4	3	6	68,85	34	4
11	MPUNDA	5272011	5272011005	MANGGEMACI	2	3	6	4	3	6	70,35	27	4
12	MPUNDA	5272011	5272011006	MONGGONAO	2	2	6	4	3	6	68,81	35	4
13	MPUNDA	5272011	5272011007	LEWIRATO	2	2	6	4	3	6	69,51	31	4
14	MPUNDA	5272011	5272011008	PENATOI	2	2	6	4	3	6	68,53	37	4
15	MPUNDA	5272011	5272011009	SANTI	2	2	6	4	3	6	68,72	36	4
16	MPUNDA	5272011	5272011010	MATAKANDO	3	4	6	4	1	4	72,36	21	5
17	RASANA TIMUR	5272020	5272020001	LAMPE	6	1	6	4	1	2	80,99	5	6
18	RASANA TIMUR	5272020	5272020002	DODU	5	2	6	4	1	2	72,41	20	5
19	RASANA TIMUR	5272020	5272020003	NUNGGGA	6	1	6	4	1	2	78,54	8	5
20	RASANA TIMUR	5272020	5272020004	KUMBE	3	2	6	4	1	5	68,13	38	4
21	RASANA TIMUR	5272020	5272020014	OI FO'O	6	1	6	4	1	2	75,10	12	5
22	RASANA TIMUR	5272020	5272020015	KODO	5	1	6	4	1	3	75,80	10	5
23	RASANA TIMUR	5272020	5272020016	LELAMASE	6	1	6	4	1	1	73,44	15	5
24	RASANA TIMUR	5272020	5272020017	OIMBO	3	2	6	4	1	5	66,70	41	4
25	RABA	5272021	5272021001	NITU	6	1	3	4	1	2	75,24	11	5
26	RABA	5272021	5272021002	RONTU	4	2	6	4	1	3	71,87	24	5
27	RABA	5272021	5272021003	RABANGODU SELATAN	2	2	6	4	2	5	69,12	32	4
28	RABA	5272021	5272021004	RABANGODU UTARA	2	6	6	4	1	6	81,92	3	6
29	RABA	5272021	5272021005	PENARAGA	2	4	6	4	1	6	70,92	26	4
30	RABA	5272021	5272021006	RABADOMPU BARAT	2	4	6	4	2	5	71,83	25	5
31	RABA	5272021	5272021007	RABADOMPU TIMUR	2	2	6	4	1	6	68,96	33	4
32	RABA	5272021	5272021008	KENDO	6	2	6	4	1	2	82,66	2	6
33	RABA	5272021	5272021009	PENANAE	4	2	6	4	1	3	72,18	23	5
34	RABA	5272021	5272021010	RITE	3	4	6	4	1	4	72,52	18	5
35	RABA	5272021	5272021011	NTOBO	6	2	6	4	1	2	79,13	7	6
36	ASAKOTA	5272030	5272030001	MELAYU	2	3	6	4	1	5	67,01	40	4
37	ASAKOTA	5272030	5272030002	JATIWANGI	5	5	6	4	1	3	80,10	6	6
38	ASAKOTA	5272030	5272030003	JATIBARU	3	5	6	4	1	4	69,61	30	4
39	ASAKOTA	5272030	5272030004	KOLO	6	4	5	4	1	3	83,66	1	6
40	ASAKOTA	5272030	5272030005	ULE	3	3	6	4	1	4	67,44	39	4
41	ASAKOTA	5272030	5272030006	JATIBARU TIMUR	6	2	6	4	1	2	81,59	4	6

Lampiran 3.

JUMLAH DAN PERSENTASE PRIORITAS KOMPOSIT

1. Jumlah Kelurahan di Masing-masing Prioritas Komposit	
Prioritas Komposit	Jumlah Kelurahan
1	0
2	0
3	0
4	16
5	18
6	7
Total	41

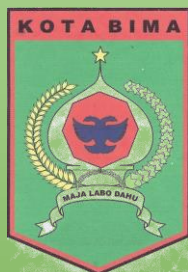
3. Jumlah Kelurahan per Prioritas Komposit di Masing-masing Kecamatan							
Jumlah Kelurahan	Prioritas Komposit						
Nama Kecamatan	1	2	3	4	5	6	Total
RASANA E BARAT	0	0	0	2	4	0	6
MPUNDA	0	0	0	6	4	0	10
RASANA E TIMUR	0	0	0	2	5	1	8
RABA	0	0	0	3	5	3	11
ASAKOTA	0	0	0	3	0	3	6
Total	0	0	0	16	18	7	41

2. Persentase Kelurahan di Masing-masing Prioritas Komposit	
Prioritas Komposit	Persentase Kelurahan
1	00,00%
2	00,00%
3	00,00%
4	39,02%
5	43,90%
6	17,07%
Total	100,00%

Lampiran 4.

FAKTOR BERPENGARUH TERHADAP RAWAN PANGAN 2023

FAKTOR YANG BERPENGARUH SECARA UMUM	
PRIORITAS KOMPOSIT	(All)
Values	
Sum of 1. Bobot Rasio Lahan	42
Sum of 2. Bobot Rasio Sarana	45
Sum of 3. Bobot Rasio Pddk Tidak Sejahtera	1
Sum of 4. Bobot Akses Jalan	0
Sum of 5. Bobot Rasio Tanpa Air Bersih	105
Sum of 6. Bobot Rasio Pddk per Tenkes per Density	26
FAKTOR YANG BERPENGARUH DI DAERAH RENTAN RAWAN PANGAN	
PRIORITAS KOMPOSIT	-
Values	
Sum of 1. Bobot Rasio Lahan	0
Sum of 2. Bobot Rasio Sarana	0
Sum of 3. Bobot Rasio Pddk Tidak Sejahtera	0
Sum of 4. Bobot Akses Jalan	0
Sum of 5. Bobot Rasio Tanpa Air Bersih	0
Sum of 6. Bobot Rasio Pddk per Tenkes per Density	0



DINAS KETAHANAN PANGAN
Jl. Gajah Mada No. 92 Penato'i Raba Kota Bima
NUSA TENGGARA BARAT



PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN / FOOD SECURITY AND VULNERABILITY ATLAS (FSVA)
BERDASARKAN PRIORITAS KOMPOSIT
KOTA BIMA TAHUN 2024

